

LAPORAN TAHUNAN

ANNUAL REPORT

2016



LAPORAN TAHUNAN
PD. BPR BKK PURWODADI
TAHUN 2016

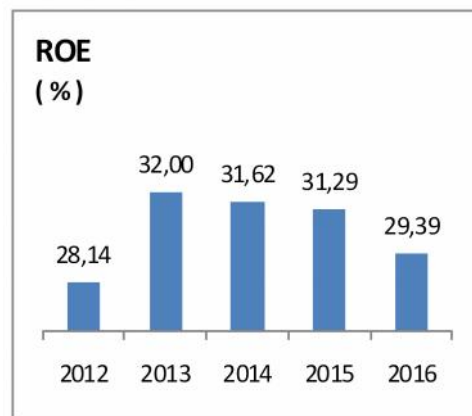
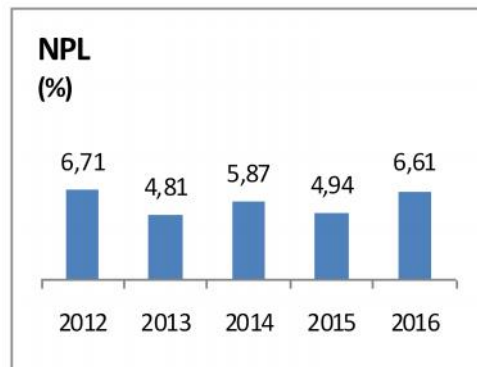
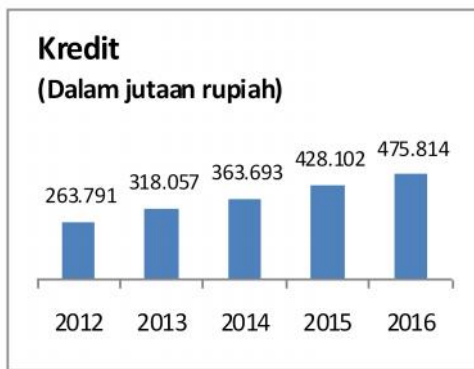
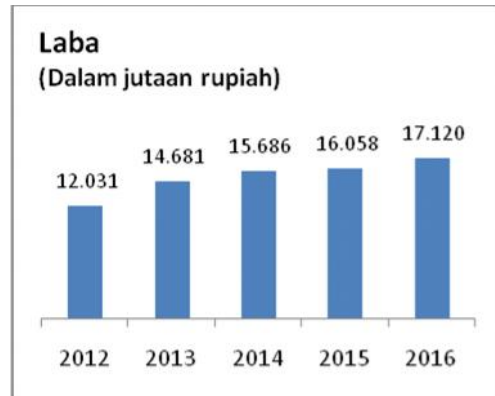
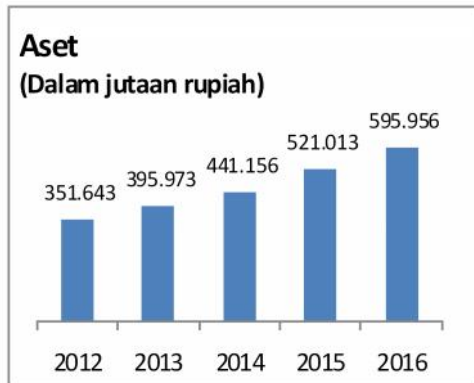
KOMITMEN BERSAMA MEMBANGUN TATA KELOLA

Komitmen merupakan sebuah janji yang diwujudkan dalam totalitas tekad untuk memegang teguh visi, misi dan kemauan untuk mengerahkan segala usaha demi tercapainya tujuan. Sejalan dengan perkembangan usaha bank yang semakin meningkat serta persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat, tahun 2016 PD.BPR BKK Purwodadi berkomitmen membangun tata kelola yang baik melalui pelampauan kepatuhan (beyond compliance) dan pengelolaan yang baik (good governing) dengan mentransformasikan nilai-nilai perusahaan guna mencapai hasil yang maksimal bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Bank secara bertahap membangun Tata Kelola Perusahaan dengan diawali pengadaan sosialisasi-sosialisasi maupun pelatihan-pelatihan perihal Peraturan OJK dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Kemudian berlanjut pada proses perubahan struktur organisasi, pengkinian terhadap pedoman kebijakan dan prosedur yang telah ada maupun yang belum ada. Serta secara berkelanjutan menerapkan budaya patuh dan sadar risiko.

Namun demikian untuk mencapai tata kelola yang berlandaskan pada prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independen dan Kewajaran diperlukan kesungguhan dan komitmen tinggi bukan hanya dari manajemen puncak (direksi dan komisaris) dan pejabat eksekutif, tetapi oleh seluruh elemen perusahaan termasuk didalamnya pegawai non operasional untuk mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya masing-masing.

Kinerja Utama Bank



DAFTAR ISI

Komitmen Bersama Membangun Tata Kelola

Kinerja Utama Bank

Daftar Isi

PROFIL PERUSAHAAN.....	1
Riyawat Singkat Bank.....	1
Kepemilikan	2
Rincian Kepemilikan Saham	3
Visi, Misi dan Statement Perusahaan	8
Bidang Usaha	9
Kepengurusan	9
Profil Dewan Pengawas	11
Profil Direksi	12
Profil Pejabat Eksekutif	14
Ikhtisar Data Keuangan	18
Peristiwa Penting Tahun 2016	19
TATA KELOLA.....	20
PrinsipTata Kelola Bank.....	20
Dasar Hukum Pelaksanaan Tata Kelola.....	21
Pelaksanaan Tata Kelola Bank Tahun 2016	21
PEMBAHASAN DAN ANALISA MANAJEMEN	39
Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Bank	39
Sasaran Tahun 2016	39
Strategi Perusahaan.....	40
Kebijakan Manajemen.....	44
Struktur Organisasi	46
Aktivitas Utama Bank	47
Satuan Kerja Audit Internal.....	51
Satuan Kerja Manajemen Risiko.....	52
Teknologi Informasi.....	57
Akuntansi Dan Pelaporan	58
Perkembangan Dan Target Pasar	59

Jaringan Dan Mitra Usaha	62
Sumber Daya Manusia.....	64
Kebijakan Fasilitas Direksi Dan Dewan Pengawas	66
Analisa Laporan Keuangan.....	66
Analisa Non Performing Loan	75
PENGUNGKAPAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	77
DASAR PENGUKURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	77
LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	90
NECARA	90
LABA RUGI.....	92
REKENING ADMINISTRATIF	93
LAPORAN ARUS KAS	94
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	95
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	96
PENJELASAN POS-POS LABA RUGI.....	97
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI.....	122
SUBSEQUENT EVENT/KEJADIAN PENTING SETELAH AUDIT KAP	122
TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN.....	123
LAMPIRAN - LAMPIRAN	124

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

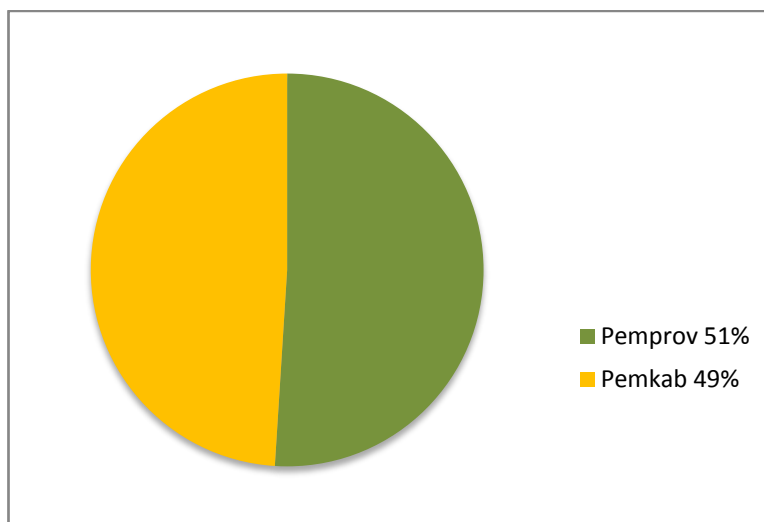
Pada awalnya PD. BPR BKK Purwodadi merupakan lembaga keuangan non Bank yang bernama Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang berdiri pada tahun 1970, dimana pada saat itu kondisi perekonomian cukup memprihatinkan, dan masyarakat pada umumnya kekurangan modal untuk kegiatan usahanya. Sementara itu lembaga-lembaga keuangan yang ada pada umumnya berlokasi di kota-kota yang jauh dari jangkauan penduduk yang sebagian besar berdomisili di pedesaan. Sampai akhirnya tanggal 8 Oktober 1991, Badan Kredit Kecamatan Purwodadi mendapat persetujuan Menteri Keuangan KEP-346/KM.13/1991 sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan tujuan untuk mendekatkan pemodalannya kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Grobogan dan sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan dasar untuk mengembangkan usaha perbankan BPR BKK di Kabupaten Grobogan, pada tanggal 21 Oktober 2005 sesuai dengan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/7/KEP.Dp G/2005 tentang ijin penggabungan usaha serta keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 503/68/2005 tentang persetujuan ijin penggabungan usaha, sebanyak 18 PD. BPR BKK se-Kabupaten Grobogan yaitu: PD. BPR BKK Toroh, PD. BPR BKK Geyer, PD. BPR BKK Wirosari, PD. BPR BKK Tawangharjo, PD. BPR BKK Ngaringan, PD. BPR BKK Kradenan, PD. BPR BKK Gabus, PD. BPR BKK Pulokulon, PD. BPR BKK Grobogan, PD. BPR BKK Klambu, PD. BPR BKK Brati, PD. BPR BKK Godong, PD. BPR BKK Penawangan, PD. BPR BKK Karangrayung, PD. BPR BKK Gubug, PD. BPR BKK Kedungjati dan PD. BPR BKK Tegowanu melakukan penggabungan (merger) menjadi PD. BPR BKK Purwodadi.

KEPEMILIKAN

Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PD. BPR BKK Purwodadi Nomor 135 tanggal 28 Desember 2012 atas Persetujuan Bank Indonesia melalui surat No.15/175/DKBU/ADAd/Sm tanggal 30 Januari 2013 dan Akta No. 4 tanggal 28 Agustus 2013 yang dibuat oleh Made Linggarasih, SH Notaris di Grobogan yang telah disetujui oleh Bank Indonesia Melalui surat No. 15/279/ DKBU/ADAd/Sm tanggal 03 Oktober 2013.

Kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 371 tanggal 22 September 2015 oleh Notaris Made Linggarasih, SH. Modal Dasar PD. BPR BKK Purwodadi ditetapkan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan komposisi kepemilikan Pemerintah Provinsi Jateng sebesar 51% dan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Grobogan Sebesar 49%.



Komposisi kepemilikan pemegang saham

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah modal disetor sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) melalui RUPS-LB tanggal 29 Desember 2016. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Grobogan menambah modal disetor sebesar Rp.2.340.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) melalui RUPS-LB tanggal 24 Juni 2016.

Sehingga berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 440 tanggal 29 Desember 2016 oleh Notaris Made Linggarasih, SH komposisi modal disetor Bank menjadi:

Nama Pemilik	Nominal	(%)
Pemprov Jateng	Rp 20.330.000.000,00	45,35
Pemkab Grobogan	Rp 24.500.000.000,00	54,65
Jumlah	Rp 44.830.000.000,00	100

Komposisi modal disetor

Komposisi perubahan modal disetor baru tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Januari 2016, sehingga komposisi modal disetor per 31 Desember 2016 masih tercatat sebagai berikut:

Nama Pemilik	Nominal	(%)
Pemprov Jateng	Rp 19.850.000.000,00	44,76
Pemkab Grobogan	Rp 24.500.000.000,00	55,24
Jumlah	Rp 44.350.000.000,00	100

Komposisi modal disetor per 31 Desember 2016

RINCIAN KEPEMILIKAN SAHAM

Selain memiliki saham di PD. BPR BKK Purwodadi Pemerintah Provinsi juga memiliki saham pada BPR BKK lain se wilayah Jawa Tengah. Berikut tabel keterkaitan kepemilikan saham pada BPR BKK maupun BKK se Jawa Tengah:

KABUPATEN/KOTA		MODAL DISETOR	
		Pemprov	
		2016	2015
A	KABUPATEN SEMARANG		
1.	BPR BKK UNGARAN	10.630.000.000	10.170.000.000
2.	BKK SUSUKAN	2.160.000.000	2.010.000.000
B	KOTA SALATIGA	-	-
3.	BKK SIDOREJO	1.960.000.000	1.350.000.000

KABUPATEN/KOTA		MODAL DISETOR	
		Pemprov	
		2016	2015
C	KABUPATEN PATI	-	-
4.	BPR BKK PATI	13.250.000.000	12.980.000.000
5.	BKK TAYU	620.000.000	520.000.000
D	KABUPATEN KUDUS	-	-
6.	BPR BKK KUDUS	5.680.000.000	5.380.000.000
E	KABUPATEN REMBANG	-	-
7.	BPR BKK LASEM	13.910.000.000	13.910.000.000
8.	BKK KALIORI	2.230.000.000	1.460.000.000
F	KABUPATEN KENDAL	-	-
9.	BPR BKK KENDAL	9.540.000.000	9.120.000.000
10.	BKK KENDAL KOTA	1.000.000.000	900.000.000
G	KABUPATEN GROBOGAN	-	-
11.	BPR BKK PURWODADI	20.330.000.000	19.850.000.000
H	KABUPATEN DEMAK	-	-
12.	BPR BKK DEMAK	9.060.000.000	8.680.000.000
13.	BKK DEMPET	2.860.000.000	1.820.000.000
I	KABUPATEN BLORA	-	-
14.	BPR BKK BLORA	12.100.000.000	11.760.000.000
J	KABUPATEN JEPARA	-	-
15.	BPR BKK JEPARA	8.510.000.000	8.080.000.000
K	KOTA MAGELANG	-	-
16.	BPR BKK KOTA MAGELANG	2.430.000.000	2.300.000.000
L	KABUPATEN BANJARNEGARA	-	-
17.	BPR BKK MANDIRAJA	14.370.000.000	13.970.000.000
18.	BKK BANJARNEGARA	2.680.000.000	2.180.000.000
M	KABUPATEN WONOSOBO	-	-
19.	BPR BKK WONOSOBO	6.100.000.000	5.870.000.000
20.	BKK KERTEK	3.070.000.000	2.460.000.000
N	KABUPATEN PURWOREJO	-	-
21.	BPR BKK PURWOREJO	9.800.000.000	9.600.000.000
22.	BKK BUTUH	800.000.000	650.000.000

KABUPATEN/KOTA		MODAL DISETOR	
		Pemprov	
		2016	2015
O	KABUPATEN MAGELANG	-	-
23	BPR BKK MUNTILAN	7.680.000.000	7.450.000.000
24	BKK TEMPURAN	2.500.000.000	2.270.000.000
P	KOTA SEMARANG	-	-
25	BPR BKK KOTA SEMARANG	10.800.000.000	10.460.000.000
Q	KABUPATEN CILACAP	-	-
26	BPR BKK CILACAP	12.170.000.000	11.770.000.000
27	BKK KESUGIHAN	3.380.000.000	2.550.000.000
R	KABUPATEN PURBALINGGA	-	-
28	BPR BKK PURBALINGGA	13.720.000.000	13.180.000.000
29	BKK KARANGMONCOL	1.480.000.000	1.160.000.000
S	KABUPATEN BANYUMAS	-	-
30	BPR BKK PURWOKERTO	15.820.000.000	15.320.000.000
31	BKK PURWOKERTO SEL	2.940.000.000	1.910.000.000
T	KABUPATEN TEMANGGUNG	-	-
32	BPR BKK TEMANGGUNG	7.020.000.000	6.670.000.000
33	BKK PRINGSURAT	1.920.000.000	1.420.000.000
U	KABUPATEN BOYOLALI	-	-
34	BPR BKK BOYOLALI	10.200.000.000	10.140.000.000
35	BKK MOJOSONGO	1.350.000.000	1.200.000.000
V	KABUPATEN KARANGANYAR	-	-
36	BPR BKK TASIKMADU	7.000.000.000	6.800.000.000
37	BKK KARANGANYAR	3.350.000.000	3.200.000.000
W	KABUPATEN WONOGIRI	-	-
38	BPR BKK WONOGIRI	12.300.000.000	11.880.000.000
39	BKK EROMOKO	4.630.000.000	3.910.000.000
X	KABUPATEN KLATEN	-	-
40	BPR BKK TULUNG	4.880.000.000	4.700.000.000
41	BKK KLATEN	6.700.000.000	6.120.000.000
Y	KABUPATEN SUKOHARJO	-	-
42	BPR BKK GROGOL	4.010.000.000	3.760.000.000
43	BKK SUKOHARJO	4.370.000.000	3.510.000.000

KABUPATEN/KOTA		MODAL DISETOR	
		Pemprov	
		2016	2015
Z	KOTA SURAKARTA	-	-
44	BKK PASAR KLIWON	2.660.000.000	2.110.000.000
AA	KABUPATEN SRAGEN	-	-
45	BPR BKK KARANGMALANG	14.280.000.000	13.870.000.000
46	BKK TANON	4.580.000.000	3.620.000.000
AB	KOTA PEKALONGAN	-	-
47	BPR BKK KOTA PEKALONGAN	3.500.000.000	3.370.000.000
48	BKK PEKALONGAN UTARA	2.810.000.000	2.280.000.000
AC	KABUPATEN TEGAL	-	-
49	BPR BKK Kab. TEGAL	5.400.000.000	5.220.000.000
50	BKK SLAWI	4.240.000.000	3.260.000.000
AD	KABUPATEN BATANG	-	-
51	BPR BKK BATANG	6.260.000.000	6.050.000.000
52	BKK BANDAR	2.110.000.000	1.960.000.000
AE	KABUPATEN PEMALANG	-	-
53	BPR BKK TAMAN	5.690.000.000	5.450.000.000
54	BKK PEMALANG	2.870.000.000	2.570.000.000
AF	KABUPATEN PEKALONGAN	-	-
55	BPR BKK Kab. PEKALONGAN	9.690.000.000	9.230.000.000
56	BKK KAJEN	2.880.000.000	2.310.000.000
AG	KOTA TEGAL	-	-
57	BPR BKK KOTA TEGAL	2.280.000.000	2.150.000.000
58	BKK TEGAL BARAT	3.070.000.000	2.590.000.000
AH	KABUPATEN BREBES	-	-
59	BPR BKK BANJARHARJO	4.880.000.000	4.650.000.000
60	BKK BREBES	5.290.000.000	4.410.000.000
AI	KABUPATEN KEBUMEN	-	-
61	BPR BKK KEBUMEN	11.880.000.000	11.380.000.000
62	BKK SRUWENG	1.040.000.000	840.000.000

Kepemilikan saham Pemprov Jateng Tahun 2016

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki keterkaitan kepemilikan saham di 33 BPR, sedangkan Pemerintah Kabupaten Grobogan selain memiliki saham di PD.BPR BKK Purwodadi juga memiliki keterkaitan saham pada Perusahaan Daerah PD BPR Purwa Artha, tiga Perusahaan Daerah Non Perbankan yaitu PD.Purwa Aksara, PDAM Purwa Tirta Dharma, dan PD.Aneka Usaha Pertanian, serta dua Perusahaan Terbatas yang meliputi PT. PRPP Jawa Tengah dan PT.Bank Jateng. Berikut jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2016:

KABUPATEN/KOTA	Tahun 2016	Tahun 2015
1. PD. BPR BKK PURWODADI	24.500.000.000	22.160.000.000
2. PD. BPR PURWA ARTHA	11.237.350.000	11.237.350.000
3. PD. PURWA AKSARA	3.706.668.000	3.206.668.000
4. PDAM PURWA TIRTA DHARMA	40.518.748.254	32.444.148.254
5. PD. ANEKA USAHA PERTANIAN	2.673.750.000	2.673.750.000
6. PT. PRPP JAWA TENGAH	531.000.000	531.000.000
7. PR. BANK JATENG	28.237.000.000	21.741.000.000
JUMLAH	111.404.516.254	93.993.916.254

Kepemilikan saham Pemkab Grobogan Tahun 2016

Sedangkan untuk jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PD. BPR BKK Purwodadi tidak ada keterkaitan kepemilikan saham baik di PD.BPR BKK Purwodadi maupun di BPR lain. Sehingga Pengurus dan Pemilik PD.BPR BKK Purwodadi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

PENGURUS BANK	PEMILIK BANK
<p>Dewan Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM Ketua Dewan Pengawas ■ Susanto, SH Anggota Dewan Pengawas <p>Direksi</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ H. Koesnanto, SH, M.Kn Direktur Utama ■ Aristian Hari Marjoko, SE Direktur Pemasaran ■ Harisanto, SE Direktur Umum & Kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 51% - Pemerintah Kabupaten Grobogan 49%

VISI, MISI & STATEMENT PERUSAHAAN

Visi dan misi merupakan syarat wajib bagi sebuah organisasi. Seperti perusahaan perbankan lainnya, Bank BKK Purwodadi memiliki visi yang meliputi pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Sedangkan misi bank meliputi petunjuk dan garis besar bagaimana mewujudkan pencapaian Visi.

VISI

Menjadikan Bank yang Sehat, Produktif dan Berkelanjutan

MISI

1. Menciptakan bank sebagai tempat terbaik dalam pelayanan.
2. Penggunaan Aset Perusahaan secara efektif dan efisien yang berorientasi pada kelangsungan perusahaan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima (excellent service) berupa kemudahan, jaringan kantor yang prima, tingkat bunga yang kompetitif, inovatif dalam produk.
4. Penggunaan teknologi yang unggul dan kompetitif.
5. Meningkatkan kualitas profesional sumber daya insani dengan memegang teguh Kode Etik Bankir Indonesia dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.
6. Berperan dalam kepedulian sosial dan melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Statement Perusahaan

Mencapai Kepuasan dan Loyalitas Nasabah

BIDANG USAHA

Berdasarkan Akta pendirian Nomor 104 tanggal 19 September 2005 dengan Notaris Made Linggarasih, SH maksud didirikannya PD. BPR BKK Purwodadi adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Giro atau jenis lainnya pada Bank lain.
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangaunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.

KEPENGURUSAN

Susunan Pengurus PD.BPR BKK Purwodadi tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas	
Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM	Ketua Dewan Pengawas
Susanto, SH *)	Anggota Dewan Pengawas

Komposisi Dewan Pengawas

*) Sudah diperhentikan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan tanggal 5-12-2016

Direksi	
H. Koesnanto, SH, M.Kn	Direktur Utama
Aristian Hari marjoko, SE	Direktur Pemasaran
Harisanto, SE	Direktur Umum dan Kepatuhan

Komposisi anggota Direksi

KEPALA BIDANG	
Suhartono, SE, Akt, MM	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Hadi Siswanto, SE	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
Suwanto, SE *)	Kepala Bidang Kredit dan Penyelesaian
Suharni, SE	Kepala Bidang Dana
Riyanto, SE	Kepala bidang SDM dan Umum
Rijanto, Amd	Kepala Bidang Akuntansi dan TI

Komposisi kepala bidang

*) Mengundurkan diri per 1 Maret 2016

PIMPINAN CABANG	
Rustam, SE	Kantor Pusat Operasional
Moh. Arwan Hamidi	Kantor Cabang Toroh
Titin Setiyowati	Kantor Cabang Geyer
Suyanto, SE	Kantor Cabang Wirosari
Suwartoyo, SE	Kantor Cabang Tawangharjo
Sukarno, A. Md	Kantor Cabang Ngaringan
Adhi Purnomo, SE	Kantor Cabang Kradenan
Supriyono, SE	Kantor Cabang Gabus
Dra. Sri Tristiani	Kantor Cabang Pulokulon
Anita Fitriyani Y, SE	Kantor Cabang Grobogan
Lusia Susandariyani, SE	Kantor Cabang Klambu
Totok Suhasto, SE	Kantor Cabang Brati
Imam Budiyanto, SE	Kantor Cabang Godong
Muhammad Sahid, SE	Kantor Cabang Penawangan
Joko Purnomo, SH	Kantor Cabang Karangrayung
Widi Raharjo, A.Md	Kantor Cabang Gubug
Purnomo, A.Md	Kantor Cabang Kedungjati
Suwarto, SE	Kantor Cabang Tegowanu

Komposisi Pimpinan Cabang

PROFIL DEWAN PENGAWAS

Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM

Ketua Dewan Pengawas

Lahir di Kota Bogor tanggal 04 Nopember 1964. Alumni Program Pasca Sarjana Doktoral Universitas Diponegoro dalam Bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Selain pendidikan formal juga aktif mengikuti berbagai pengembangan kompetensi diantaranya, *Tidal Swamp Institute* (1995), *Diklatpim II* (2008), *Sertifikasi Dewan Pengawas Bank* (2014), *Executive Development Program Corporate Business Value* (2013), *Executive Development Program Effective Business Plan* (2014), serta *Optimalisasi Peran dan Tanggungjawab Komisaris Perusahaan* (2014). Banyak karya tulis yang telah terbit di media masa dan majalah perbankan seperti *Info Bank* tahun 2014.

Pengalaman karir mulai pada tahun 2000 sebagai Kasi Pengembangan Produksi Holtikultural, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, selanjutnya berturut-turut sebagai Kepala Sub Bagian Kelautan dan Perikanan, Kepala Bagian Sarana Biro Perekonomian, Kepala Bagian Pelaporan, Analisis dan Kajian Pembangunan, selanjutnya menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Pemprov Jateng, kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan tahun 2013 sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan.

Mulai bergabung di PD. BPR BKK Purwodadi sejak tahun 2005 sebagai Ketua Dewan Pengawas merangkap Anggota dan diperpanjang kembali sampai sekarang melalui RUPS-LB tanggal 23 April 2015.

PROFIL DIREKSI

Koesnanto, SH, M.Kn

Direktur Utama

Lahir di Grobogan pada tanggal 14 Nopember 1968 dan bertempat tinggal di Perum Ayodya I, Jl.Sangkata Blok B No.06, Kuripan, Purwodadi. Menyelesaikan pendidikan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro pada tahun 2010.

Karir didunia perbankan dimulai pada tahun 1993 menjadi staf di PD. BPR BKK Wirosari, kemudian pada tahun 1998 sebagai Kasi Pelayanan. Selanjutnya menjabat sebagai Direktur II di PD. BPR BKK Tegowanu tahun 2003. Pada tahun 2005, bersamaan dengan merger PD. BPR BKK se-Kabupaten Grobogan, diangkat menjadi Direktur Umum PD. BPR BKK Purwodadi. Dan tahun 2010 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama PD.BPR BKK Purwodadi.

Komitmen dan Loyalitasnya terhadap perusahaan mengantarkan PD. BPR BKK Purwodadi tidak hanya dikenal salah satunya adalah penghargaan “Favorite Banking and Insurance Winner 2015” di tahun 2015. Selain itu berbagai penghargaan juga diperoleh oleh PD. BPR BKK Purwodadi dibawah kepemimpinan beliau.

Aristian Hari Marjoko, SE

Direktur Pemasaran

Lahir di Semarang tanggal 22 September 1969, dan bertempat tinggal di kelurahan Pundakpayung, Banyumanik Kota Semarang. Tahun 2003 lulus dari STIE Cendekia Karya Utama Semarang Program Studi Manajemen Ekonomi.

Karir profesional sebagai Direktur dimulai pada tahun 1998 di PD. BPR BKK Semarang Tengah. Kemudian berlanjut menjadi Direktur Utama PD. BPR BKK Gayamsari pada tahun 2000. Bertepatan dengan merger PD. BPR BKK Semarang

Tengah beliau diangkat menjadi Direktur Pemasaran PD.BPR BKK Semarang Tengah dari tahun 2005 sampai tahun 2009. Tahun 2010 menjabat sebagai Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Purwodadi hingga 2014, kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Pemasaran periode 2014 sampai dengan tahun 2018.

Harisanto, SE

Direktur Umum dan Kepatuhan

Lahir di Grobogan tanggal 18 Agustus 1970 dan bertempat tinggal di Jalan Harjuna Nomor 04 Purwodadi. Beliau merupakan alumnus STIE STIKUBANK tahun 2001 Program Studi Manajemen Keuangan.

Kiprah di dunia perbankan mulai tahun 1993 di PD.BPR BKK Karangrayung. Kemudian diangkat menjadi Kepala seksi Pelayanan tahun 1998. Pada tahun 2003 diangkat menjadi Direktur di PD.BPR BKK Brati. Kemudian pada saat merger PD. BPR BKK se-Kabupaten Grobogan pada tahun 2005 menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi dan TI di PD.BPR BKK Purwodadi. Kemudian melalui RUPS-LB pada tanggal 11 Februari 2015 ditetapkan sebagai Direktur Umum PD.BPR BKK Purwodadi periode 2015 sampai dengan tahun 2019.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

KEPALA BIDANG

Suhartono, SE, Akt., MM

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Pendidikan : Sarjana S2 Manajemen Universitas Semarang

Hadi Siswanto, SE

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi

Riyanto, SE

Jabatan : Kepala Bidang SDM dan Umum

Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi STIE Pelita Nusantara

Rijanto, A.Md

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan TI

Pendidikan : Diploma III Ekonomi STIKUBANK Semarang

Suwanto, SE

Jabatan : Kepala Bidang Kredit dan Penyelesaian

Pendidikan : Sarjana S1 Manajemen

Suharni, SE

Jabatan : Kepala Bidang Dana

Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi STIKUBANK Semarang

PIMPINAN CABANG

Rustam, SH

Jabatan : Pimpinan Kantor Pusat Operasional
Pendidikan : Sarjana S1 Hukum Universitas Muria Kudus

M. Arwan Hamidi

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Toroh
Pendidikan : Diploma III Ekonomi

Titin Setiyowati

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Geyer
Pendidikan : Diploma III Ekonomi

Suyanto, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Wirosari
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi Universitas Muria Kudus

Suwantoyo, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Tawangharjo
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi STIE Wijaya Mulya Surakarta

Sukarno, A.Md

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Ngaringan
Pendidikan : Diploma III Ekonomi AKA Wika Jasa Semarang

Adhi Purnomo, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Godong
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi Universitas Diponegoro

Supriyono, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Gabus
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi STIE Atma Bhakti Surakarta

Anita Fitriyani Yususf, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Grobogan
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dra. Sri Tristiani

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Pulokulon
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi Universitas Terbuka

Lusia Susandariyani, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Klambu
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi

Totok Suharto, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Brati
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi Universitas Muria Kudus

Imam Budiyanto, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Godong
Pendidikan : Sarjana S1 Manajemen STIE Atma Bhakti

Muhammad Sahid, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Penawangan
Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi Universitas Muria Kudus

Joko Purnomo, SH

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Karangrayung

Pendidikan : Sarjana S1 Hukum Universitas Sultan Agung Semarang

Widi Raharjo, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Gubug

Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi STIE Atma Bhakti Surakarta

Purnomo, A. Md

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Kedungjati

Pendidikan : Diploma III Ekonomi AKA Wika jasa

Suwarto, SE

Jabatan : Pimpinan Kantor Cabang Grobogan

Pendidikan : Sarjana S1 Ekonomi STIE Atma Bhakti Surakarta

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

1. Perkembangan Keuangan

(dalam jutaan rupiah)

	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aset	351.643	395.973	441.156	521.013	595.956
2	Penempatan Bank Lain	81.272	68.024	68.505	84.685	112.235
3	Kredit yang diberikan	263.791	318.057	363.693	428.102	475.814
4	Inventaris	5.781	6.988	9.166	10.368	10.648
5	Kewajiban	3.883	2.453	3.628	3.199	509.217
6	Pinjaman yang diterima	-	-	7.917	17.495	23.259
7	Tabungan	201.056	236.039	265.296	322.460	366.421
8	Deposito	85.728	89.618	90.472	99.270	114.599
9	Ekuitas	60.977	67.864	73.843	77.149	86.739

Perkembangan Keuangan Periode 2012-2016

2. Perkembangan Laba rugi

(dalam jutaan rupiah)

	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Pendapatan Operasional	62.005	71.298	79.065	84.633	98.887
	a. Pendapatan Bunga	59.937	68.694	76.617	80.821	94.699
	b. Pendapatan Lainnya	2.068	2.603	2.448	3.812	4.188
2.	Biaya Operasional	46.948	51.371	57.641	63.103	76.210
	a. Beban Bunga	16.760	17.122	19.456	21.259	25.055
	b. Beban PPAP	6.369	3.629	6.076	4.353	7.769
	c. Beban Pemasaran	613	1.274	1.651	1.822	2.102
	d. Beban Adm	22.374	28.540	29.796	35.116	40.779
	e. Beban Lainnya	832	806	661	553	505
3.	Pendapatan non Op	4.064	2.954	3.833	4.890	5.591
4.	Beban Non Operasional	2.970	3.306	4.196	4.956	5.456
5.	Laba Sebelum Pajak	16.151	19.575	21.061	21.465	22.812
6.	Pajak	4.121	4.894	5.375	5.407	5.693
7.	laba Bersih	12.031	14.681	15.686	16.058	17.120

Laporan Laba Rugi Periode 2012-2016

3. Perkembangan Rasio Keuangan

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015	2016
CAR	22,88	21,58	21,36	18,41	18,78
KAP	4,78	3,66	4,70	3,64	4,67
RATIO PPAP	101,38	103,40	107,23	100,06	100,00
NPL	6,71	4,81	5,87	4,94	6,61
ROA	4,92	5,35	4,87	4,42	3,92
BOPO	75,72	71,58	72,24	74,56	77,07
NIM	12,39	13,46	13,36	11,74	11,96
ROE	28,14	32,00	31,62	31,29	29,39
LDR	78,19	82,61	84,64	84,21	81,69

Rasio Keuangan Periode 2012-2016

4. Perkembangan NPL

(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kolektibilitas kredit :					
1. Lancar	249.272	303.653	342.334	406.936	444.342
2. Kurang lancar	2.357	3.686	3.294	3.778	4.985
3. Diragukan	1.734	1.598	3.388	3.750	6.607
4. Macet	13.837	10.072	14.677	13.638	19.880
Jumlah Baki Debet	267.200	319.009	363.693	428.102	475.814
Non Performing Loan (NPL)	6,71	4,81	5,87	4,94	6,61

Perkembangan NPL Periode 2012-2016

PRINSIP TATA KELOLA BANK

Penerapan tata kelola PD.BPR BKK Purwodadi berlandaskan pada lima prinsip diatas atau yang disebut TARIF serta telah dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 dan ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016, yaitu meliputi:

1. Transparency (Keterbukaan) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya, namun tidak mengurangi kewajiban dalam pemenuhan ketentuan rahasia Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Accountibility (Akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan efektif.

Bank menetapkan kejelasan tanggungjawab dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan Visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan pengelolaan Bank berjalan efektif.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.

Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk menjaga kelangsungan usaha bank, serta ikut berperan aktif dalam kepedulian sosial sebagaimana visi dan misi bank.

4. Indenpedency (Independen) yaitu Pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Bank senantiasa menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Fairness (Kewajaran) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Bank senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholder dan memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Tata Kelola PD.BPR BKK Purwodadi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

PELAKSANAAN TATA KELOLA

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/pojk.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keangan No.05/SEOJK.03/2016 bahwasanya BPR dengan Modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) harus memiliki Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, sampai dengan 31 Desember 2016 PD.BPR BKK Purwodadi telah memiliki 3 orang direksi yang terdiri dari:

- a. H. Koesnanto, SH, M.Kn sebagai Direktur Utama
- b. Aristian Hari Mardjoko, SE sebagai Direktur Pemasaran
- c. Harisanto, SE sebagai Direktur Umum

Direksi Utama ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PD.BPR BKK Purwodadi tanggal 30 September 2014 tentang penetapan dan pengangkatan sdr. H. Koesnanto, SH, M.Kn menjadi direktur utama PD.BPR BKK Purwodadi dengan masa periode jabatan 21 Oktober 2014 sampai dengan 21 Oktober 2018. Direktur Pemasaran PD.BPR BKK Purwodadi sdr. Aristian Hari Mardjoko, SE diangkat melalui RUPS-LB tanggal 30 Mei 2014 dengan masa jabatan 30 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2018. Sedangkan pengangkatan direktur Umum yang dipegang oleh Sdr. Harisanto, SE berdasarkan RUPS-LB tanggal 11 Februari 2015 dengan masa periode jabatan 11 Februari 2015 sampai dengan 11 Februari 2019.

Direktur umum membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko dengan tidak membawahkan fungsi operasional Bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Hal ini ditegaskan melalui RUPS-LB tanggal 10 September 2015 perihal Nomenklatur Direktur Umum menjadi Direktur Umum dan Kepatuhan, serta RUPS-LB tanggal 27 Februari 2017 perihal penetapan Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola BPR, yaitu meliputi:

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusan dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi telah mengelola Bank dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan hasil audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intenal Bank, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Direksi senantiasa menindaklanjuti rekomendasi Dewan Pengawas sehubungan dengan hasil temuan maupun langkah strategis Bank.
5. Direksi memberikan perhatian terhadap terwujudnya pelaksanaan tata kelola perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, diantaranya adalah dengan berkesinambung mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan tata kelola.
6. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola, Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam hal fungsi kepatuhan dijalankan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk menyelaraskan antara unsur kepatuhan dengan eksposur yang melekat pada Bank.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

1. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Pengawas

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa BPR dengan modal inti paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Bank BKK Purwodadi seharusnya adalah sebanyak 3 Orang. Namun dengan masa berakhirnya jabatan dewan pengawas atas nama Susanto, SH yang berakhir tanggal 05 desember 2016 yang dinotarilkan dalam Akta notaris No.440 tanggal 29 Desember 2016 perihal pemberhentian anggota dewan pengawas serta proses pengajuan Dewan pengawas Independen yang belum selesai maka komposisi dewan pengawas PD.BPR BKK Purwodadi pada laporan Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ihwan Sudrajat	Ketua Dewan Pengawas
Susanto**)	Anggota Dewan Pengawas
-	Dewan Pengawas Independen

Komposisi Dewan Pengawas

Catatan:

***) Sudah diperhentikan karena masa jabatan habis tanggal 05 Desember 2016

Persyaratan berupa Jumlah dan Komposisi anggota Dewan Pengawas sampai dengan Desember tahun 2016 belum sepenuhnya terpenuhi, namun demikian Bank belum melewati batas waktu perihal pemenuhan anggota dewan pengawas independen tanggal 1 April 2017.

2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas, berikut garis besar tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas sepanjang tahun 2016:

- a. Dewan Pengawas sebagai organ organisasi telah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata kelola berupa pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasehat, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional.
- c. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temua audit SKAI, Auditor eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Rekomendasi Dewan Pengawas

Sepanjang tahun 2016 dewan pengawas telah melakukan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Hasil rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam risalah

rapat dan didokumentasikan dengan baik dan merupakan rekomendasi atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh direksi.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komite.

Sesuai dengan POJK No.4 tahun 2015 tentang Tata Kelola, dengan modal inti kurang dari 80 Milyar Bank BKK Purwodadi belum membentuk komite, baik komite audit maupun komite kepatuhan.

Penanganan Benturan Kepentingan

Sampai dengan Desember tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi Bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

Sebagaimana dalam SEOJK No.6 tahun 2016, fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan dari otoritas lainnya.

Fungsi Kepatuhan Bank dijalankan oleh Pejabat Eksekutif Satuan Kerja Manajemen Risiko dibawah wewenang dan Tanggungjawab Direktur Umum selaku Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan. Dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan, sampai dengan Desember 2016 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman pada tindakan fungsi kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini. Upaya-upaya tersebut meliputi:

1. Membuat daftar kewajiban penyampaian laporan bulan berikutnya pada setiap akhir bulan.
2. Senantiasa mengingatkan unit kerja yang memiliki kewajiban menyampaikan laporan kepada otoritas Bank dan pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Bukti penerimaan laporan yang telah disampaikan kepada OJK ataupun otoritas lainnya diadministrasikan oleh bidang SDM bagian surat menyurat dibawah pengawasan fungsi kepatuhan.
4. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK dengan baik, Direktur Umum mengundang unit kerja terkait untuk melakukan pembahasan dan komitmen untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada jajaran Direksi.
5. Fungsi kepatuhan dibawah Satuan Kerja Manajemen Risiko senantiasa berkoordinasi dengan bidang SDM untuk menga-up date atau membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru.
6. Dalam upaya mewujudkan budaya sadar kepatuhan, semua elemen Bank diwajibkan menggaungkan visi dan misi perusahaan setiap hari senin serta menggaungkan budaya sadar risiko dan budaya sadar kepatuhan setiap hari selasa sampai hari kamis.

Walaupun Bank telah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan kesalahan, namun sampai dengan laporan tahun 2016 terdapat denda sebesar Rp. 6.622.713,00. Hal tersebut segera ditindaklanjuti oleh fungsi kepatuhan sebagai evaluasi dan perbaikan terhadap kepatuhan sehingga ditahun 2017 nanti tidak akan terjadi kesalahan yang sama.

2. Fungsi Audit Intern

Penerapan Fungsi Audit Bank dijalan oleh Satuan Kerja Audit Intern yang terdiri dari 1 (satu) kepala SKAI dan 4 (empat) orang anggota SKAI dengan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016.

Sepanjang tahun 2016, SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan tugasnya, SKAI menggunakan metode *Surprise Audit* keseluruhan kantor cabang dimana rencana audit hanya diketahui oleh Kepala SKAI dan Direktur Utama, tanpa pemberitahuan kepada kantor cabang yang akan diperiksa.

Hasil temuan pemeriksaan SKAI telah disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas serta ditembuskan kepada Direktur Umum sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Untuk selanjutnya temuan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh auditet dengan jangka waktu yang telah disepakati. Selain Direksi memberikan catatan atau instruksi perihal hasil temuan, SKAI Bank juga telah memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif untuk kelangsungan usaha Bank.

3. Fungsi Audit Ekstern

Dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern Bank berpedoman pada POJK No.4 tahun 2015 pasal 62 butir (1) dimana Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan. Untuk pelaksanaan Audit laporan keuangan tahun buku 2016, Bank menunjuk KAP **Sodikin & Harijanto** dengan nomor pendaftaran 288 nomor register AP.0878. Dalam melaksanakan pemeriksaan auditor mampu bekerja secara independen, profesional dan bertindak objektif. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Penerapan Manajemen risiko (termasuk sistem pengendalian intern).

Pada tanggal 3 November 2015 Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang diundangkan pada tanggal 12 November 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Dengan demikian ketentuan penerapan manajemen risiko telah resmi diberlakukan sejak tanggal 12 November 2015. Pelaksanaan manajemen risiko, dibawah Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari Kepala satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Sub bidang Pengendalian Risiko dan Kepala sub bidang APU & PPT yang didalamnya bertanggungjawab terhadap fungsi kepatuhan.

Pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Bank dimulai dengan laporan *Rencana Tindak lanjut Manajemen Risiko* yang berisi tentang:

1. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yang meliputi Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Penunjukan pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan Pembentukan Komite Manajemen Risiko.
2. Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggungjawab Direksi dan Dewan Pengawas terkait penerapan Manajemen Risiko.
3. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat Kebijakan manajemen Risiko Prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko; Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; Sistem Informasi manajemen Risiko; Sistem Pengendalian Intern; Produk dan aktivitas baru.

Walaupun masih bersifat parsial, bank telah menerapkan Manajemen risiko dengan cakupan meliputi Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko Likuiditas, Risiko reputasi dan Risiko stratejik. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK bahwa bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko dengan 6 cakupan risiko.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Bank yang telah dilaksanakan meliputi:

- a. Telah terdapat kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha dan jenis layanan Bank
- b. Bank telah menetapkan wewenang dan tanggungjawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan Manajemen risiko. Serta menetapkan wewenang dan tanggungjawab untuk pemantauan kepatuhan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko
- c. Bank telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas.
- d. Struktur organisasi Bank telah menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank.
- e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional bank telah dilakukan secara akurat dan tepat waktu
- f. Terdapat kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan.
- g. Terdapat dokumen secara lengkap dan memadai
- h. Dilakukannya verifikasi dan review terhadap system pengendalian intern oleh satuan kerja manajemen risiko.

Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis PD.BPR BKK Purwodadi (*business plan*) telah disusun sesuai visi dan misi Bank, serta berdasarkan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan peluang bisnis dan kekuatan Bank sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang melekat pada Bank. Dalam menerapkan rencana Bisnis, Bank senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik serta memperhatikan faktor eksternal dan internal sehingga rencana bisnis yang dibuat dapat menjadi sarana untuk mengendalikan risiko strategis.

Rencana bisnis Bank terangkum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang setiap tahunnya telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk perubahannya. Sedangkan dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas senantiasa melakukan pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester sekali dalam Laporan Pelaksanaan RKAP.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/43/DPNP tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU Tanggal 31 Juli 2013 Perihal Laporan Tahunan Dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat. Sampai dengan tutup buku tahun 2016. Bank telah menyusun laporan keuangan Publikasi setiap triwulan sekali dan memuat laporan tersebut dalam Surat kabar setiap setahun sekali dengan materi sesuai dengan ketentuan OJK. Transparansi informasi mengenai perkembangan produk, layanan terhadap nasabah, perkembangan laporan keuangan, serta informasi-informasi umum lainnya dilaporkan Bank dalam Laporan Tahunan yang dibuat oleh Direksi dan telah dilaporkan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sedangkan Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, serta Laporan pengaduan, tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan Bank sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan secara tepat waktu.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Bank BKK Purwodadi, selama tahun 2016 pemilik saham telah menyetorkan modal sebanyak Rp.2.820.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sehingga total modal yang telah disetor oleh pemilih saham adalah sebesar Rp.44.830.000.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Terdiri dari Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 24.500.000.000,- (dua puluh milyar lima ratus juta rupiah) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.20.330.000.000,- (dua puluh milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Sehingga sampai dengan Desember 2016 tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.

Berikut tabel kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan pengawas sampai dengan Desember 2016:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham %			
		Bank	Bank lain	LKBB *)	Perush
Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM	Ketua Dewas	0%	0%	0%	0%
Susanto, SH **)	Anggota Dewas	0%	0%	0%	0%
Dalam proses	Dewas Independen	0%	0%	0%	0%
H. Koesnanto, SH, M.Kn	Direktur Utama	0%	0%	0%	0%
Aristian Hari Marjoko, SE	Direktur Pemasaran	0%	0%	0%	0%
Harisanto, SE	Direktur Umum	0%	0%	0%	0%

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi & Dewan Pengawas

Catatan:

*) Lembaga Keuangan Bukan Bank

**) Sudah diperhentikan karena masa jabatan berakhir pada tanggal 05 Desember 2016.

Sedangkan kepemilikan saham pemegang saham Bank BKK Purwodadi adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Rp. 20.330.000.000,-	45,35%
2. Pemerintah Kabupaten Grobogan	Rp. 24.500.000.000,-	54,65%
TOTAL	Rp. 44.830.000.000,-	100,00%

Kepemilikan Pemegang Saham

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas berasal dari kalangan profesional dan tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas lainnya. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Pengawas juga tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan termasuk mertua, menantu, dan ipar dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Dewan Pengawas Bank BKK Purwodadi.

Berikut tabel hubungan keluarga dan keuangan anggota Direksi dan Dewan Pengawas per Desember 2016:

Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga	Hubungan Keuangan
Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM	Ketua Dewas	Nihil	Nihil
Susanto, SH **)	Anggota Dewas	Nihil	Nihil
Dalam proses	Dewas Independen	Nihil	Nihil
H. Koesnanto, SH, M.Kn	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Aristian Hari Marjoko, SE	Direktur Pemasaran	Nihil	Nihil
Harisanto, SE	Direktur Umum	Nihil	Nihil

Tabel Hubungan Kerja dan Keuangan

Catatan:

**) Sudah diperhentikan karena masa jabatan berakhir pada tanggal 05 Desember 2016.

Paket/Kebijakan Remunisasi dan Fasilitas lain bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 pasal 75 butir (3) dan Pasal 39 (c), serta Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Romawi VII butir 7 (f), Paket atau kebijakan remunisasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Anggota Direksi dan dan Dewan Pengawas sepanjang tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

1. Berupa uang

(dalam ribuanrupiah)

Jenis Remunisasi	Direktur			Dewas		
	Dirut	Dirpem	Dirum	Ketua	Anggota	Independen
Gaji/Honor	123.600	98.880	98.880	174.305	139.444	Nihil
Tunjangan ²	312.164	245.459	228.227			Nihil
Tantiem	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Kompensasi berbasis saham	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Jumlah Gaji	435.764	344.339	327.107	174.305	139.444	Nihil

Tabel Kebijakan Remunisasi Berupa Uang

2. Berupa fasilitas lain/non uang

Jenis Remunisasi	Direksi			Dewan Komisaris		
	Dirut	Dirpem	Dirum	Ketua	Anggota	Independen
Perumahan	Nihil	Sewa rumah		Nihil	Nihil	Nihil
Transport	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Mobil dinas	Nihil	Nihil
Asuransi Kesehatan	BPJS BUMIDA	BPJS BUMIDA	BPJS BUMIDA	BPJS BUMIDA	BPJS BUMIDA	Nihil
Telp Cell	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel Kebijakan Remunisasi Berupa Fasilitas Lain

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.

Berikut rasio gaji tertinggi dan gaji terendah Bank sampai dengan laporan posisi Desember 2016 dalam skala perbandingan:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 91% : 9%
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah; 57% : 43%
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah; 56% : 44%
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi; 71% : 29%
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi; 73% : 27%

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas.

Sesuai dengan POJK NO.4/POJK.03/2016 Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat paling sedikit 30 (tiga) bulan sekali dengan dihadiri oleh seluruh anggota dewan pengawas. Selama tahun 2016, Dewan Pengawas Bank BKK purwodadi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, namun dihadiri oleh ketua Dewan Pengawas sebanyak 6 (enam) kali dan anggota Dewan Pengawas hanya 2 (dua) kali. Berikut daftar rapat Dewan Pengawas tahun 2016:

No	Tanggal	Materi Rapat	Kehadiran	
			Ihwan Sudrajat	Susanto
1	5 Jan 2016	KOmitmen tidak lanjut setiap Regulasi	Hadir	Tidak hadir
2	28 Jan 2016	Evaluasi tahun 2015 & rencana Kerja tahun 2016	Hadir	Hadir
3	8 April 2016	Evaluasi Pencaipan kinerja	Hadir	Hadir
4	7 Mei 2016	Rekomendasi Dewan Pengawas perihal perbaikan kinerja	Hadir	Tidak hadir
5	15 Sept 2016	Evaluasi kinerja	Hadir	Tidak hadir
7	21 Okt 2016	Konfirmasi hasil temuan OJK	Hadir	Tidak hadir

Daftar Rapat Dewan Pengawas

Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi dan Upaya penyelesaian oleh BPR;

Sampai dengan tutup tahun 2016 tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi maupun anggota Dewan pengawas. Namun selama tahun 2016 terdapat penyimpangan prosedur kredit atas penyalahgunaan fasilitas kredit oleh nasabah kantor cabang Tegowanu atas nama parsiti sehingga mengakibatkan kerugian pada Bank. Atas penyimpangan tersebut, Bank telah melakukan upaya tindak lanjut penyelesaian berupa:

1. Memberikan sanksi administratif kepegawaian kepada karyawan yang bertanggungjawab, selanjutnya karyawan tersebut mengundurkan diri.
2. Melakukan mutasi kepada Pimpinan Cabang dan sanksi administratif berupa penurunan jabatan.
3. Memonitoring atas komitmen pimpinan cabang yang bersangkutan untuk menyelesaikan penyalahgunaan fasilitas kredit tersebut, sehingga sampai dengan akhir Desember 2016 terdapat penurunan baki debit yang signifikan.
4. Untuk menghindari hal serupa terjadi lagi, Bank mengadakan pendidikan Anti Fraud pada bulan September 2016 dan bulan November 2016.

Sedangkan jumlah internal fraud yang sedang dalam proses penyelesaian di internal BPR dan jumlah internal fraud yang belum diupayakan penyelesaiannya serta jumlah internal fraud yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum adalah NIHIL. Berikut tabel jumlah internal fraud Bank sampai dengan Desember 2016:

Internal Fraud dalam 1tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn lalu	Thn 2016	Thn lalu	Thn 2016	Thn lalu	Thn 2016	Thn lalu	Thn 2016
Total Fraud	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	2 kasus	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam proses penyelesaian diinternal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui proses hukum.		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Tabel Jumlah Internal Fraud

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR;

Sampai dengan periode Desember tahun 2016 permasalahan yang dihadapi Bank dapat diselesaikan secara internal sehingga tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Berikut tabel permasalahan Hukum Bank sampai dengan tutup tahun 2016:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0
Total	Nihil	Nihil

Tabel Permasalahan Hukum

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat transaksi yang melibatkan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pemegang Pengendali yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Bentura Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Tabel Postensi Benturan Kepentingan

- *) - tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
 - menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana.

Sesuai dengan Misi PD.BPR BKK Purwodadi butir ke 6 yaitu berperan dalam kepedulian sosial, keberadaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan salah satu bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan daerah berupa kepedulian kepada masyarakat dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut. Sepanjang tahun 2016 bank ikut terlibat dalam kegiatan sosial baik berbentuk bingkisan maupun dalam bentuk uang. Berikut tabel kegiatan Bank dalam rangka berpartisipasi dalam kegiatan sosial:

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Bencana alam(banjir) di desa lemah putih, Gubug.	Rp. 6.000.000,00
2	Buka bersama anak yatim dan pemberian bingkisan	Rp.42.876.000,00
3	Sumbangan pembangunan jalan	Rp. 2.500.000,00
4	Pasar murah dalam rangka memberikan kontribusi kepada masyarakat kecil	Rp. 22.294.000,00

Tabel Kegiatan Sosial Bank

HASIL SELF ASSESMENT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 pasal 77 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 05/SEOJK.03/2016 romawi VI, PD.BPR BKK purwodadi telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola Bank. Dari hasil penilaian sendiri dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tata Kelola Bank memperoleh Nilai Komposit 2,42 dan predikat Komposit **“Baik”** dengan pertimbangan bahwa Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola hampir sebagian besar telah dilaksanakan, yaitu:

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan Direksi telah dipenuhi oleh Bank.
2. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan Dewan pengawas telah dipenuhi oleh Bank. Sedangkan untuk jumlah dan komposisi Dewan Pengawas belum sepenuhnya dapat terpenuhi sehubungan dengan proses pergantian anggota Dewan Pengawas yang berakhir tanggal 5 Desember 2016 dan proses pengajuan anggota Dewan Pengawas Independen.
3. Pembentukan Satuan Kerja Audit Internal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, yaitu membantu Direktur utama dalam melakukan pengawasan operasional Bank, serta memberikan saran perbaikan terkait hasil temuan.

4. Dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan dan risiko-risiko Bank lainnya, Bank telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Satuan Kerja Manajemen Risiko juga menjalankan fungsi kepatuhan dan bertanggungjawab secara langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
5. Struktur permodalan Bank semakin kuat dengan adanya penambahan modal disetor oleh pemilik saham sebesar Rp. 2.820.000.000,00 pada tahun 2016. Sehingga modal disetor Bank sampai dengan posisi Desember tahun 2016 sebesar Rp.44.350.000.000,00.
6. Kinerja keuangan Bank semakin membaik dengan ditandai oleh pencapaian-pencapaian RKAP sampai dengan Desember 2016.
7. Fundamental Bank pada tahun 2016 tetap kuat dengan ditandai tidak adanya AYDA, kualitas aktiva produktif masih dalam kategori sehat yaitu 4,67%, CAR Bank berada pada posisi 18,78%, serta NIM Bank sebesar 11,96%

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BANK

Sebagaimana dalam akta pendirian No. 104 tanggal 19 September 2005 tujuan pendirian PD.BPR BKK Purwodadi adalah membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Bank memiliki strategi dengan memfokuskan usahanya melalui penyediaan dana pada segmentasi kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah serta kelompok yang memiliki penghasilan tetap setiap bulannya termasuk di dalamnya adalah kelompok Pegawai Negri Sipil (PNS). Sedangkan untuk menghadapi persaingan bisnis perbankan di wilayah Kabupaten Grobogan yang semakin ketat, bank senantiasa meningkatkan mutu dan pelayanan

Berikut sasaran, strategi dan kebijakan Bank tahun 2016:

SASARAN TAHUN 2016

1. Tercapainya target jangka pendek (semester I)

Target jangka pendek (Semeter Pertama) tahun 2016 disusun dengan asumsi bahwa perekonomian tahun 2016 diperkirakan tumbuh sebesar 5,25%.

- Aset sebesar Rp. 561.707.039 ribu.
- Produksi Kredit sebesar Rp. 252.027.029 ribu.
- Tabungan sebesar Rp. 355.632.451 ribu.
- Deposito sebesar Rp. 98.185.448 ribu.
- *Outstanding Credit* (OSC) sebesar Rp. 464.722.796 ribu.
- NPL maksimal sebesar 4,34%.
- Pencapaian pendapatan sebesar Rp. 43.350.846 ribu.
- Mencapai laba Bank sebesar Rp. 10.754.738 ribu

2. Tercapainya target jangka panjang

- Laba tercapai sebesar Rp.21.498.929,-ribu sebelum pajak.
- Penghimpunan dana tumbuh menjadi Rp.467.097.595,-ribu.

- OSC tumbuh 11,55% atau sebesar Rp.475.602.569,-ribu.
 - NPL sebesar 3,78%
3. Bidang Nasabah
- Menambah mobil kas malam untuk memudahkan transaksi nasabah
 - Meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga harapan menambah jumlah nasabah debitur maupun kreditur dapat terwujud.
4. Bidang Proses Bisnis Internal
- Upaya peningkatan modal disetor oleh Pemilik Saham.
 - Membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM di wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Penguatan struktur bank.
 - Meningkatkan kepatuhan pada ketentuan Peraturan bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan-peraturan lainnya.
 - Memantapkan Penerapan Prinsip APU dan PPT
5. Bidang Pembelajaran dan Pertumbuhan
- Meningkatkan kualitas auditor internal bank.
 - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan perkembangan usaha bank.
 - Mengefektifkan implementasi budaya kerja disemua jenjang kepegawaian.
 - Menyiapkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kelancaran operasional bank.
 - Meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk memperlanjar penyelesaian tugas.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS

Melakukan Analisis SWOT

1. Kekuatan
 - a. PD. BPR BKK Purwodadi merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan.
 - b. Telah menjalin hubungan yang baik dengan instansi atau dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

- c. Memiliki gedung yang refresentatif, dua lantai dan tempat strategis.
 - d. Memiliki Kantor Cabang di setiap kecamatan dan beberapa kantor kas.
 - e. Memiliki pelayanan yang ramah, cepat, tepat dan sistem jaringan online sehingga nasabah bisa tarik dan setor tunai di seluruh kantor cabang dan kantor kas.
 - f. Memiliki SDM yang berkualitas (sebagian besar berlatar pendidikan S1).
 - g. Suku bunga kredit yang kompetitif dan bersaing dengan bank lain.
- 2. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Khusus**
- a. Pengembangan teknologi akan tetap menjadi perhatian manajemen.
 - b. Aktivitas marketing masih perlu ditingkatkan.
 - c. Penanganan kredit non lancar perlu langkah yang lebih progresif.
 - d. Pendayagunaan dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi yang dimiliki belum optimal.
 - e. Pengembangan SDM yang tersedia belum mengarah pada keunggulan komparatif dibandingkan Bank pesaing.
- 3. Kesempatan**
- a. Beberapa industri yang dibangun di wilayah Kabupaten Grobogan seperti di Kecamatan Tawangharjo, Kecamatan Wirosari dan Kecamatan Ngaringan membuka peluang baru.
 - b. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat menengah ke bawah dalam memanfaatkan layanan jasa perbankan.
 - c. Perkembangan teknologi perbankan akan memicu terciptanya produk dan diversifikasi produk baru.
 - d. Pertumbuhan perekonomian masyarakat terus membaik.
 - e. Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan bahwa perkembangan perekonomian dipusatkan di wilayah kecamatan.
 - f. Sekitar 66% mata pencarian penduduk Grobogan berada di sektor pertanian sehingga peluang untuk pengembangan kredit di sektor pertanian masih sangat luas, ditunjang program Gubernur Jawa Tengah dengan Kartu Petani.
 - g. Pasar UMKM dengan plafond 50 juta keatas memberikan kesempatan dalam meningkatkan perekonomian lokal.
 - h. Meningkatnya upah minimum kota.

4. Ancaman

- a. Semakin agresif dan aktifnya bank-bank pesaing dalam melakukan pemasaran dan ekspansi pada segmen pasar yang menjadi pangsa pasar PD. BPR BKK Purwodadi menimbulkan persaingan semakin tajam.
- b. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tanggal 31 Desember 2015.
- c. *Shadow Banking* yang juga merambah pada segmen perbankan seperti FIF, BAF, ARDIRA dan Pegadaian.
- d. Program-program pemerintah seperti KUR.

Melakukan Pendekatan Kepada Pemilik Saham

1. Mendorong kepada pemilik untuk komitmen kepada pengembangan Bank.
2. Meminta kepada pemilik untuk memberikan ruang promosi kepada Bank.
3. Meminta kepada pemilik untuk menempatkan dana desa di BPR.
4. Meminta kepada pemilik untuk memberikan subsidi bunga kepada nasabah peminjam di sektor pertanian.

Mengevaluasi Lokasi Kantor

1. Bank melihat dan melakukan kajian terhadap beberapa desa yang potensial untuk dibuka kantor kas dengan pertimbangan efisiensi pelayanan dan kedekatan dengan nasabah, karena jarak tempuh yang jauh dengan kantor cabangnya serta tingkat persaingan yang masih rendah.
2. *One Fund One Village* artinya dana yang dihimpun dari desa akan dikembalikan ke desa tersebut, sehingga bisa meningkatkan perekonomian di desa tersebut.

Memonitoring Peluang Bisnis

1. Bank fokus pada core bisnis yaitu pada UMKM menambah share di pertanian dengan konsumtif sebagai penunjang.
2. Karakteristik Pelayanan Bank:
 - Mudah : dalam persyaratannya.
 - Murah : bunga kompetitif.
 - Mengarah : kepentingan Debitur.
 - Sederhana : dalam prosedurnya.

- Cepat : dalam prosesnya.
3. Optimalisasi mobil kas keliling untuk pelayanan jemput bola.
 4. Menggunakan EDC untuk pelayanan jemput bola.
 5. Menambah NOA (*Number of Account*).

Melakukan Diferensiasi Produk.

Menciptakan Diferensiasi Produk dengan membedakan produk Bank pada atribut non harga dan harga, dengan menerapkan kebijakan harga yang kompetitif.

Melaksanakan Konsep Marketing 10:5:1.

Seorang marketing harus mendapatkan 10 calon nasabah untuk ditelepon, 5 calon nasabah di follow up dan 1 calon nasabah harus membuka rekening dalam 1 hari.

Peningkatan Modal BPR.

1. Menetapkan BLR secara benar dan terukur.
2. Pertumbuhan laba usaha yang sehat dengan melakukan penataan aset secara produktif dan sehat.
3. Melakukan efisiensi *overhead cost*.
4. Mendorong pemilik untuk melakukan perubahan modal dasar.
5. Mendorong pemilik untuk meningkatkan modal disetor.
6. Melakukan revaluasi aktiva tetap (tanah).

Penurunan Non Performing Loan (NPL)

- a. Melakukan pelelangan terhadap agunan tambahan nasabah peminjam yang tidak mengindahkan peringatan BPR setelah melakukan mediasi yang dilakukan BPR.
- b. Melakukan AYDA (Agunan Yang Diambil Alih).
- c. Mencoba melakukan upaya Subrogasi (*subrogation*) atau pengalihan dari kreditur lama ke kreditur baru.
- d. Memperkuat Team AMU.

KEBIJAKAN MANAJEMEN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Aspek Kepatuhan

- a. Menunjuk Direktur Kepatuhan sebagai penanggungjawab atas kepatuhan Pegawai BPR.
- b. Membuat Budaya Kepatuhan.
- c. Pengkinian Pedoman Kerja dengan melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur.
- d. Menetapkan Sistem dan Prosedur Kepatuhan
- e. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan pegawai telah mematuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbankan.
- f. Memantau dan menjaga agar kegiatan BPR tidak menyimpang dari peraturan
- g. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Melakukan sosialisasi kepada pegawai yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan.
- b. Jika memungkinkan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*).
- c. Menunjuk Pegawai sebagai *contact person* atas pelaksanaan kepatuhan BPR baik untuk internal maupun eksternal.

3. Teknologi Informasi

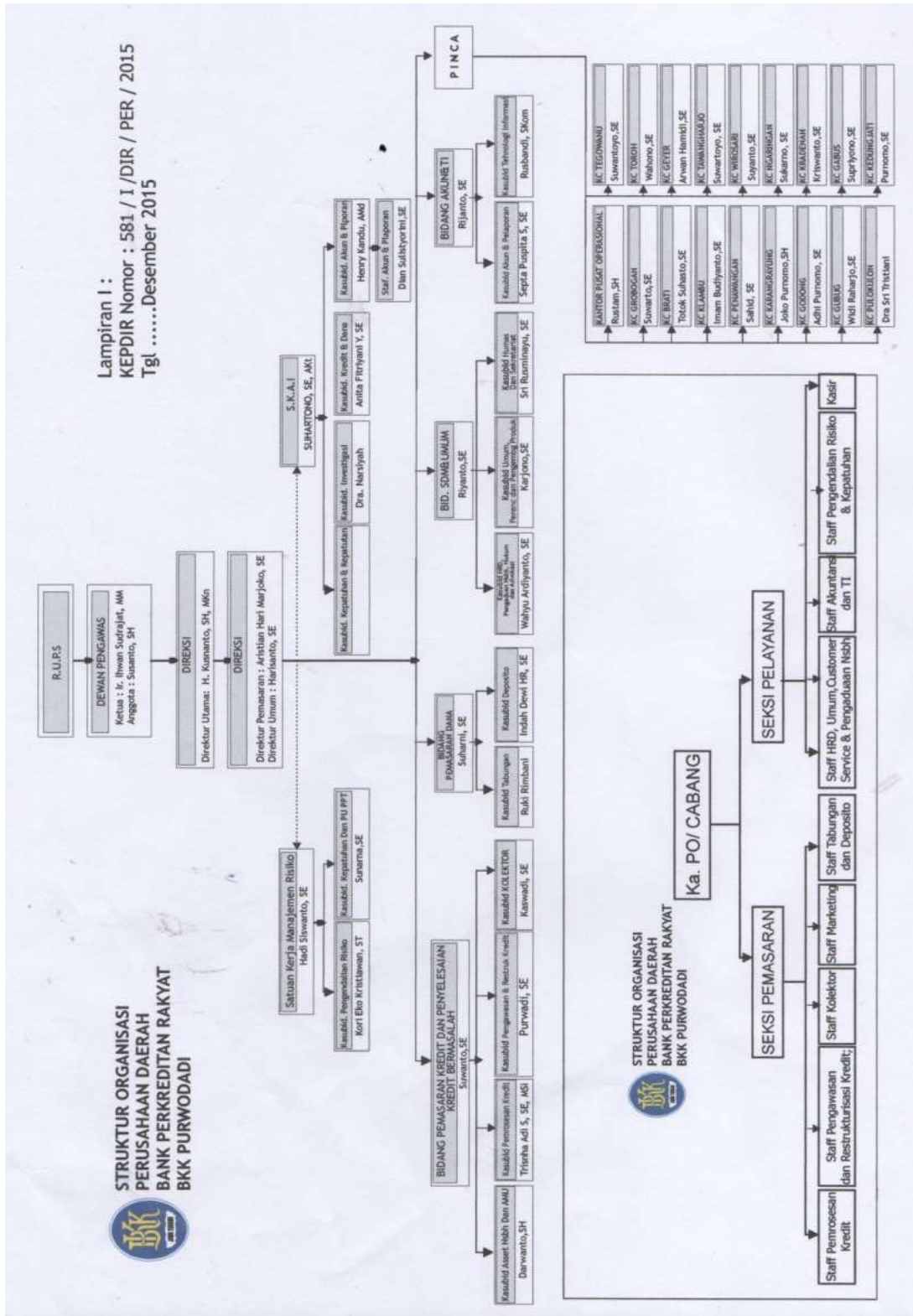
- a. Memastikan pelaksanaan Teknologi Informasi yang mampu mendukung fungsi kepatuhan.
- b. Membuat Database peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perbankan.

Penguatan Operasional Bank

1. Peningkatan Kualitas Layanan Nasabah
 - a. Menunjuk Direktur Pemasaran sebagai penanggungjawab atas kualitas layanan nasabah.
 - b. Membuat sistem dan prosedur tentang layanan prima (*excellent service*).
 - c. Melakukan evaluasi atas produk, ketentuan dan kebijakan yang berkaitan dengan produk BPR.
 - d. Membuat nilai tambah (*added value*) atas produk bank.
2. Pemanfaatan Layanan Perbankan
 - a. Memastikan bahwa produk *fee base income* dapat mendukung pendapatan BPR.
 - b. Mencari layanan-layanan baru dan inovasi atas layanan yang sudah ada.
 - c. Melakukan kajian atas keunggulan layanan dari Bank lain.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bank tahun 2016 berdasarkan Peraturan Direksi PD. BPR BKK Purwodadi Nomor 581/I/DIR/PER/2015 sebagai berikut:



AKTIVITAS UTAMA BANK

Menurut UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk [deposito](#) berjangka, [tabungan](#) dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dari pengertian tersebut aktivitas utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana yang kemudian dikembangkan menjadi produk-produk unggulan Bank.

Menghimpun Dana (Funding)

Tamades

Tamades merupakan simpanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum, pegawai dan pelajar yang penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Berdasarkan SK Direksi No.581/242/DIR/BPRBKK/XII/2015, bunga tamades antara 3,25% sampai dengan 4,75% per-tahun.

TabunganKu

Tabungankumerupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bunga TabunganKu sebesar 4% per tahun, dengan setoran awal hanya sebesar Rp.10,-ribu dan tanpa ada biaya administrasi.

Tabungan Wajib

Tabungan wajib merupakan tabungan yang diwajibkan kepada seluruh debitur Bank BKK Purwodadi. Setoran awal sebesar 2% dari plafon. Saldo dalam tabungan wajib bersifat mengendap, tidak boleh diambil sebelum pinjaman nasabah lunas, kecuali dengan syarat tertentu. Tabungan wajib juga mendapat bunga sebesar 0,5% pertahun dengan biaya administrasi sebesar seribu rupiah.

Cibi Save

Cibi save merupakan simpanan berjangka yang diperuntukkan bagi perorangan dengan jangka waktu minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun. Bunga sibi save adalah sebesar 4% dengan nilai tambah proteksi asuransi jiwa.

Tabungan Siswako

Tabungan siswaku merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar yang didalamnya ada perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan bagi penabung. Bunga tabungan siswaku adalah 2%,

Tabungan Umroh

Tabungan umroh merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang menginginkan ibadah umroh namun belum memiliki cukup dana dengan bunga 1% pertahun.

Deposito

Deposito merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum yang penarikannya hanya boleh dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Bunga deposito 1 bulan sebesar 6,5% pertahun, 3 bulan sebesar 7% per tahun, 6 bulan sebesar 7,25% pertahun dan 12 bulan sebesar 7,5% pertahun.

Menyalurkan Dana (Lending)

UMKM

Produk Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada debitur Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dengan perhitungan bunga berdasarkan jumlah plafon yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu plafon Rp.1,-juta sampai Rp.10,- juta suku bunga 1,08% per bulan, diatas Rp.10,- juta sampai Rp.50,- juta suku bunga 1,04% per bulan dan diatas Rp.50,- juta 0,95% perbulan. Produk Kredit UMKM masuk dalam sektor perdagangan dan industri.

Multi manfaat

Kredit Multi Manfaat merupakan kredit yang diberikan kepada debitur tanpa dibatasi jenis usaha atau sumber penghasilannya serta tidak dibatasi penggunaannya. Suku

bunga kredit Multi Manfaat adalah 1,25% perbulan flat dan masuk pada sektor bukan lapangan usaha lainnya.

Kredit Polisi

Kredit Polisi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang memiliki profesi sebagai Polisi. Maksimal plafon kredit untuk Kredit Polisi adalah sebesar Rp.150,- juta, dengan suku bunga 13,75% per tahun dengan sistem annuitas. Kredit Polisi ini masuk pada sektor jasa perorangan lainnya.

Kredit TNI

Kredit TNI merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang memiliki profesi sebagai Tentara Nasional Indonesia. Maksimal plafon kredit TNI adalah sebesar Rp.150,- juta, dengan suku bunga 0,75% per bulan flat. Kredit TNI ini masuk pada sektor jasa perorangan lainnya.

Kredit Pegawai

Kredit Pegawai merupakan kredit yang diberikan kepada debitur yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kredit dengan plafon sampai Rp.30,- juta hanya dipersyaratkan menggunakan Foto Copy SK Pegawai, tetapi Kredit dengan plafon diatas Rp.30,- juta harus menggunakan SK asli atau ada penambahan agunan. Bunga untuk Kredit Pegawai mulai dari Rp.30,- juta suku bunga 1%, dan dibawah Rp.30,- juta suku bunga 1,25% per bulan. Kredit pegawai ini masuk pada sektor jasa perorangan lainnya.

Kredit Halo Petani

Kredit Halo Petani merupakan kredit yang pembiayaannya dipergunakan untuk usaha pertanian atau perkebunan. Suku bunga Kredit Halo Petani adalah 1,95% sampai 2,5% per bulan dan masuk pada sektor pertanian. Produk Halo Petani pertama kali disosialisasikan pada bulan Nopember 2014 menggantikan pertanian sebelumnya.

BCL (BKK Customer Loan)

BCL merupakan Kredit Tanpa Agunan dan Tanpa Potongan. Produk ini ditujukan kepada UMKM yang berasosiasi dan masyarakat berpenghasilan rendah (UPPKS

DASAR). Plafon maksimal Kredit BCL adalah sebesar Rp.5,- juta dengan suku bunga 1,2% per bulan. Kredit BCL ini masuk pada sektor perdagangan.

BKK Air

Kredit BKK Air merupakan kredit yang lahir sebagai bentuk respon bank terhadap program pemerintah dalam program bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Kredit ini bisa digunakan untuk pembiayaan yang berhubungan dengan sanitasi, air bersih dan kesehatan lingkungan. Kredit BKK Air diutamakan bagi nasabah yang masih memiliki sanitasi yang kurang sehat dan nasabah baru yang belum mempunyai akses sanitasi dan air. Plafon Kredit BKK Air adalah Rp.10,- juta untuk perorangan dan plafon sampai dengan Rp.50,- juta untuk BPSPAMS dengan jangka Suku bunga 1% per bulan. Kredit BKK Air masuk pada sektor lapangan usaha lainnya.

BKK Umroh

Kredit BKK Umroh merupakan Kredit yang diberikan kepada debitur yang pembiayaannya digunakan untuk tujuan Ibadah Umroh. Persyaratan Kredit BKK umroh nasabah harus memiliki tabungan Umroh sebesar Rp.6,- juta. Suku bunga Kredit BKK umroh adalah 1% per bulan dan masuk pada sektor lapangan usaha lainnya.

Jasa Bank lainnya

Pengiriman Uang Western Union

Merupakan jasa penerimaan uang secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan secara lintas Negara atau dalam satu Negara. BPR BKK Purwodadi sebagai agen dari Western Union menyediakan jasa pengiriman uang ke/dari seluruh dunia. Layanan ini dapat digunakan oleh siapa saja baik nasabah BPR BKK Purwodadi maupun non nasabah BPR BKK Purwodadi, karena tidak memerlukan rekening bank ataupun keanggotaan.

Payment Point Online Billing (PPOB)

Merupakan jasa pelayanan bank yang melayani pembayaran tagihan PDAM, pembayaran listrik dan pembelian tiket, dan lain-lain melalui teller di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Kas.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Fungsi Audit Internal di BPR BKK Purwodadi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi dan memiliki akses langsung untuk berkoordinasi dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan hasil audit. Pelaksanaan tugas audit internal dilakukan dengan dua cara yaitu audit rutin dan audit khusus. Audit rutin merupakan kegiatan audit yang direncanakan secara sistematis sesuai dengan yang telah direncanakan, sedangkan audit khusus dilaksanakan karena adanya pertimbangan tertentu berdasarkan tingkat urgensinya ataupun adanya permintaan dari stakeholder.

Sedangkan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Audit Internal diantaranya meliputi:

1. Mengelola audit internal dan melaporkan kegiatan audit kepada Direksi dan Dewan Pengawas Bank BKK Purwodadi.
2. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada kegiatan yang mempunyai risiko tinggi.
3. Melaporkan hasil audit kepada Direksi, Dewan Pengawas dan OJK.
4. Senantiasa memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
5. Melakukan koordinasi kegiatan audit dengan auditor eksternal.

Setiap anggota Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki integritas, kompetensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut komposisi Satuan Kerja Audit Internal Bank sampai dengan 31 Desember 2016:

NAMA	JABATAN
Suhartono, SE., Akt., MM	Kepala Satuan Kerja Audit Internal
Dra. Narsiah	Ka.Subid. Investigasi
Eny Nurhayati	Ka.Subid. Kredit & Dana
Henry Kandu N Nugraha, A.Md	Ka.Subid. Akuntansi & Pelaporan
Isrotin Nurfilliana	Anggota

Tabel. Komposisi Satuan Kerja Audit Internal

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada POJK Nomor 13/POJK.03/2015 dan SEojk No.05/POJK.03/2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Sehubungan dengan hal tersebut PD.BPR BKK Purwodadi secara konsisten telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan operasional perbankan. Hal ini tercermin dari perubahan struktur organisasi dari bidang manajemen risiko menjadi Satuan Kerja Manajemen Risiko dimana kedudukannya sejajar dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), selain itu terdapat penambahan kepala sub bidang pengendalian risiko yang bertugas mengidentifikasi atas risiko-risiko.

Upaya lain bank dalam meningkatkan perbaikan penerapan manajemen risiko adalah dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan tentang manajemen risiko, sehingga diharapkan pengelolaan risiko secara keseluruhan dapat dilakukan secara terpadu, terarah, terkoordinir dan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja usaha bank.

Sesuai dengan struktur organisasi perusahaan, susunan Satuan Kerja Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Hadi Siswanto, SE	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko
Sunarna, SE	Ka.Subid. APU & PPT
Kori Eko Setiawan, ST	Ka.Subid. Pengendalian Risiko

Tabel. Komposisi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sedangkan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Manajemen Risiko sampai dengan tahun 2016 adalah memberikan pandangan atau membantu direksi dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu dalam menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko, termasuk perencanaan keadaan darurat untuk mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan usaha maupun akibat dari kondisi eksternal bank.

2. Memperbaiki atau menyempurnakan penerapan manajemen risiko baik secara berkala maupun insidental atas perubahan kondisi yang mempengaruhi kecukupan permodalan.
3. Memberikan masukan atau pembenaran yang tepat berupa rekomendasi kepada direksi atas segala sesuatu yang terkait dengan keputusan bisnis yang melampaui dari batasan risiko yang telah ditetapkan.

IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN RISIKO

Pada dasarnya penerapan manajemen risiko merupakan proses yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi
2. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta informasi manajemen risiko.
4. Sistem Pengendalian internal secara menyeluruh.

Berikut pelaksanaan manajemen risiko sampai dengan tahun 2016:

RISIKO KREDIT

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

Identifikasi risiko Kredit

1. Penggunaan fasilitas kredit yang tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana dituangkan dalam memorandum permohonan kredit;
2. Kegagalan usaha yang dibiayai oleh bank;
3. Pemberian kredit pada sektor ekonomi yang tidak Produktif;
4. Adanya kebijakan baru dari pemerintah atau dunia internasional yang merugikan kelangsungan usaha debitur;
5. Penanganan NPL yang kurang Optimal;
6. Fraud oleh Petugas Bak

Dampak risiko Kredit

1. Ketidاكلancaran pengembalian kembali oleh debitur;
2. Menurunnya KAP Bank ;
3. NPL Bank Meningkat.

4. Fraud mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan meningkatnya beban PPAP.

Pengendalian risiko Kredit

1. Membekali pelatihan-pelatihan perkreditan kepada seluruh staf kredit
2. Menggunakan fasilitas SID setiap ada pengajuan kredit.
3. Memberikan kredit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar calon nasabah.
4. Melakukan analisa yang matang.
5. Senantiasa melakukan monitoring pada kredit non lancar maupun kredit lancar.

RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

1) Risiko Operasional pada Aktivitas Perkreditan

Berdasarkan pada hasil identifikasi terhadap aktivitas perkreditan maka risiko operasional dapat dilihat melalui ; Kegagalan dan kesalahan Sistem; Accounting Error; Fraud; Force Majeur; Kelengkapan dan keabsahan dokumen

2) Risiko Operasional pada Aktivitas Treasury

Berdasarkan pada hasil identifikasi terhadap aktivitas treasury maka risiko operasional dapat dilihat melalui ; Kegagalan dan kesalahan system; Accounting error; Fraud; Fonce Majeur; Kelengkapan dan keabsahan dokumen

3) Risiko Operasional pada Aktivitas Operasional dan jasa

Bendasarkan pada hasil identifikasi terhadap aktivitas Operasional (akunting, Back Office, Teller dan Customer Servive) dan jasa (kliring, Transfer, Custodian) tinggi rendahnya risiko operasional dapat dilihat melalui ;Kegagalan dan kesalahan system; Accounting enror; Frauds; Ketengkapan dan keabsahan dokumen; Human error; Tingkat keberhasilan produk/sistem/jasa baru

4) Risiko Operasional pada Aktivitas Pendanaan

Hasil identifikasi terhadap aktivitas pendanaan maka tingkat risiko operasional pada aktivitas pendanaan dapat ditihat melaui : Fraud; kesalahan administrasi

5) Risiko Operasional pada Aktivitas Tehnologi Sistem informasi dan Sistem informasi Manajemen

Berdasarkan pada hasil identifikasi terhadap aktivitas Tehnologi Sistem informasi dan Sistem Informasi Manajemen maka tinggi rendah risiko operasionalnya dapat

dilihat melalui ; Kegagalan dan kesalahan system; Fraud; Human error; Publikasi negative

6) Risiko Operasional pada Aktivitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sesuai identifikasi terhadap aktivitas pengelolaan Sumber Daya Manusia maka tingkat risiko operasionalnya dapat dilihat melalui : Publikasi negative; Integritas karyawan/pengurus; Pendidikan karyawan/pengurus; Employee satisfaction; Tuntutan oleh karyawan (legal action)

RISIKO LIKUDITAS

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Identifikasi risiko Likuiditas

1) Risiko Likuiditas pada Aktivitas Perkreditan

Berdasarkan pada hasil identifikasi pada aktivitas perkreditan maka tinggi rendahnya risiko likuiditas dapat terlihat melalui tingkat kemampuan bank untuk memenuhi seluruh komitmen pemberian kepada debitur termasuk pemanfaatan kelonggaran tarikannya.

2) Risiko likuiditas pada Aktivitas Treasury

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap aktivitas treasury maka tinggi rendahnya risiko likuiditas dapat dilihat melalui tingkat kecukupan secondary reserve dengan cara membandingkan Net Cash Out Flow selama periode waktu tertentu dengan Total Dana Pihak Ketiga.

3) Risiko likuiditas pada Aktivitas Pendanaan

Berdasarkan pada hasil identifikasi terhadap aktivitas pendanaan maka tinggi rendahnya risiko likuiditas dapat dilihat melalui :

- Tingkat kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo pokok dan bunga dana simpanan nababah
- Konsentrasi jangka waktu dana simpanan masyarakat; dan
- Konsentrasi dana simpanan masyarakat pada deposito inti.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Identifikasi risiko Kepatuhan

- 1) Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, seperti: jenis dan kompleksitas usaha Bank, termasuk produk dan aktivitas baru;
- 2) Jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, praktek dan standar etika bisnis yang sehat;
- 3) Jumlah dan materialitas dari tuntutan litigasi dan keluhan nasabah yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dapat menjadi salah satu sumber identifikasi terhadap risiko kepatuhan.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

IDENTIFIKASI RISIKO KEPATUHAN

- 1) Risiko reputasi yang perlu diidentifikasi adalah risiko reputasi yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasure* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi dan MIS, dan sumber daya manusia.
- 2) Pencatatan dan penatausahaan setiap *events* yang terkait dengan risiko reputasi termasuk jumlah potensi kerugian baik secara kuantitatif ataupun kualitatif yang diakibatkan *events* dimaksud dilakukan dalam suatu sistem administrasi data.
- 3) Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data statistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

RISIKO STRATEJIK

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

IDENTIFIKASI risiko Stratejik

- 1) Bank harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan Bank.

- 2) Bank harus melakukan analisa Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau beR Risiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa.
- 3) Pengidentifikasian risiko strategis dilakukan pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi serta operasional dan jasa.
- 4) Pencatatan dan penatausahaan perubahan kinerja sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang signifikan

TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem Teknologi Informasi (TI) yang kuat merupakan salah satu pondasi terpenting bagi bank untuk terus tumbuh dan berkembang dalam dunia bisnis perbankan. Untuk itu bank secara bertahap membuat Rencana Kerja Teknologi Informasi yang diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang.

Pada tahun 2016 pengembangan Teknologi Informasi bank masih diarahkan pada optimalisasi pelayanan nasabah yang diantaranya adalah penambahan mobil kas keliling yang dioperasikan pada malam hari. Sehingga masyarakat diberikan tambahan kemudahan selain bertransaksi pada siang hari juga dapat melakukan transaksi perbankan pada malam hari.

Selain berfokus pada optimalisasi pelayanan nasabah, pengembangan Teknologi Informasi juga menitik beratkan pada peningkatan kehandalan dan keamanan infrastruktur Teknologi Informasi yang meliputi pengamanan jaringan, penggunaan sistem keamanan komputer, penerapan metode Multi Layered Security atau metode sistem keamanan berlapis, serta pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung kegiatan operasional yang saling terintegrasi.

Sampai dengan tahun 2016 selain Core Banking System, aplikasi yang telah dikembangkan di PD.BPR BKK Purwodadi antara lain:

1. Aplikasi Tool gabungan yaitu aplikasi yang berfungsi untuk mengetahui total laporan keuangan dari seluruh cabang.

2. Aplikasi SimPeg yaitu aplikasi yang memuat segala kebutuhan karyawan-karyawati PD. BPR BKK Purwodadi seperti sistem penggajian, kenaikan pangkat berkala serta daftar riwayat pegawai.
3. Aplikasi Monit APP yaitu aplikasi yang digunakan untuk memantau user yang sedang login di aplikasi sibi.
4. Aplikasi SMS (Short Masege Service) Gateway yang merupakan aplikasi untuk memberikan informasi produk bank, ucapan kepada nasabah secara dan menerima pesan dari nasabah melalui SMS.

Jaringan yang digunakan oleh PD. BPR BKK Purwodadi adalah Jaringan Wireless menggunakan frekuensi gelombang Radio dan jaringan kabel Fiber Optic (FO). Jaringan Wireless digunakan untuk mendukung aplikasi FTP, E-mail, CCTV, Finger Print, Akses Internet. Sedangkan Aplikasi Core Banking Sistem menggunakan jaringan Fiber Optik sebagai jaringan utama yang lebih stabil dengan kecepatan transmisi data tinggi dan lebih aman dari gangguan.

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Sistem pelaporan keuangan yang mudah dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan merupakan karakteristik laporan keuangan menurut PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) yang selama ini diterapkan dan terus dikembangkan oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi keuangan. Sama halnya dengan BPR lain, pelaporan keuangan bank berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Struktur organisasi akuntansi dan pelaporan dibawah Bidang Akuntansi dan TI yang dipimpin oleh Kepala Bidang Akuntansi dan TI. Sampai dengan tahun 2016, tugas dan tanggungjawab Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan financial fundamental.
2. Mengontrol seluruh aktivitas keuangan lintas departemen.
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan rencana bank, sebagai bentuk kerjasama dengan bidang SDM.

4. Mengevaluasi dan menyampaikan pelaporan keuangan yang auditabel sesuai dengan kebijakan akuntansi bank.
5. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan guna sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja bank.
6. Menyajikan dan melaporkan laporan keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara tepat waktu.

Sehubungan dengan sumber daya manusia Bidang Akuntansi dan TI, bank secara berkala terus meningkatkan kompetensi setiap personil melalui pelatihan-pelatihan, baik dari segi teknis TI dan Akuntansi, manajemen risiko, maupun proses bisnis dan regulasi perbankan.

Struktur organisasai Bidang Akuntansi dan TI sebagai berikut:

NAMA	JABATAN
Rijanto, Amd	Kepala Bidang
Rusbandi, S.Kom	Ka.Subid. Teknologi Informasi
Septa Puspitasari, SE	Ka.Subid. Akuntansi & Pelaporan
Agus Suyanto	Staf Penunjang Bisnis
Sholeh Koesdianto	Staf Pengembangan
Rizky Putra W	Staf Pengembangan
Ridho Bongga Priyono	Staf Pengembangan Jaringan

Tabel. Komposisi Bidang Akuntansi Dan TI

PERKEMBANGAN DAN TARGET PASAR

Perputaran usaha bank dalam kategori baik dan sesuai dengan rencana bisnis, hal ini tercermin dari aset bank yang meningkat sebesar 14,38% dari aset sebesar Rp.521.013.381,-ribu periode Desember 2015 meningkat menjadi Rp.595.956.425,-ribu pada periode Desember 2016. Disisi pencapaian rencana kerja, aset bank tercapai sebesar 100,39% dari rencana sebesar Rp.593.643.051,-ribu tercapai sebesar Rp.595.956.425,-ribu.

Kredit yang diberikan pada semester II Tahun 2016 tercapai sebesar 98,62% dari rencana sebesar Rp.482.491.951,-ribu terealisasi sebesar Rp.588.048.872,-ribu,

Walaupun Kredit yang diberikan belum tercapai 100%, namun ekspansi kredit per 31 Desember 2016 tercapai sebesar 106,56% dari rencana sebesar Rp.488.102.921,-ribu terealisasi sebesar Rp.520.145.525,-ribu. Hal ini menunjukkan optimis bank dalam memproduksi dan memasarkan produk kreditnya.

Posisi simpanan Pihak ke III menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari laporan Year of Year tabungan meningkat sebesar 13,63% dan deposito sebesar 15,44%. Sedangkan sampai 31 Desember 2016 simpanan bank tercapai sebesar 100,75% dari rencana sebesar Rp.363.688.657,-ribu terealisasi sebesar Rp.366.420.722,-ribu dan deposito tercapai sebesar 110,82% dari rencana sebesar Rp.103.408.938,ribu tercapai sebesar Rp.114.598.800,-ribu. Dari perkembangan dan pencapaian tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam menangkap peluang bisnis perbankan dengan tetap diimbangi kualitas pemasaran yang handal.

Keberhasilan Bank dalam mengelola aset terwujud dengan pencapaian laba setelah pajak sebesar 106,17% dari rencana sebesar Rp.16.124.198, ribu tercapai sebesar Rp.17.119.604,-ribu. Pencapaian ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha bank, namun juga pada kesejahteraan karyawan.

Berkelanjut dari target tahun 2015, target pasar bank pada tahun 2016 adalah masih pada sektor konsumtif yang didominasi oleh pegawai negeri dimana sistem angsurannya menggunakan metode potong gaji, sehingga tingkat risiko kreditnya lebih rendah. Target pasar bank lainnya adalah Kredit Usaha Mikro, yang terdiri dari masyarakat kecil yang juga berpenghasilan minimal, namun memiliki karakter dan kemampuan bayar yang baik. Berikut tabel realisasi kredit sampai dengan Desember 2016 yang menunjukkan kemampuan bank dalam membidik target pasar bank:

KETERANGAN	RENCANA TAHUN 2016	REALISASI TAHUN 2016	%
Realisasi kredit yang diberikan :			
1. Usaha mikro			
(Kredit dg plafon s.d. Rp. 50 juta)			
- Sekt pertanian, perburuan & kehutanan	156.478.911	131.627.400	84,12
- Sekt industri pengolahan	2.594.066	2.235.500	86,18
- Sekt perdagangan besar & eceran	143.811.674	116.607.479	81,08
- Sekt jasa perorangan lainnya	1.237.561	2.027.175	163,80
- Sekt bukan lapangan usaha lainnya	102.571.079	133.675.468	130,32
Jumlah	406.693.291	386.173.023	94,95
2. Usaha kecil			
(Kredit dg plafon > Rp. 50 juta s.d. Rp. 500 juta)			
- Sekt pertanian, perburuan & kehutanan	-	220.000	
- Sekt industri pengolahan	1.610.630	1.575.000	97,79
- Sekt perdagangan besar & eceran	58.363.366	87.142.831	149,31
- Sekt jasa perorangan lainnya	1.048.289	3.420.000	326,25
- Sekt bukan lapangan usaha lainnya	20.292.990	33.114.672	163,18
Jumlah	81.315.275	125.472.502	154,30
3. Usaha menengah			
(Kredit dg plafon > Rp. 500 juta)			
- Sekt pertanian, perburuan & kehutanan	-	-	
- Sekt industri pengolahan	-	-	
- Sekt perdagangan besar & eceran	-	8.500.000	
- Sekt jasa perorangan lainnya	-	-	#DIV/0!
- Sekt bukan lapangan usaha lainnya	94.355	-	-
Jumlah	94.355	8.500.000	9.008,53
Jumlah realisasi kredit yang diberikan	488.102.921	520.145.525	106,56

Tabel Realisasi Kredit Mikro Per 31 Desember 2016

JARINGAN DAN MITRA USAHA

JARINGAN USAHA BANK

PD.BPR BKK Purwodadi memiliki 1 Kantor Pusat Operasional, 17 Kantor Cabang, 4 Kantor Kas yang tersebar di 18 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah alamat kantor cabang dan kantor kas PD.BPR BKK Purwodadi :

Kantor Cabang	Alamat
1. Kantor Pusat Operasional	Jl. Siswamiharja No. 40 Purwodadi
2. Kantor Cabang Toroh	Jl. Raya Purwodadi-Solo No.110 Toroh
3. Kantor Cabang Geyer	Jl. Raya Purwodadi-Solo KM 15 Gundih
4. Kantor Cabang Wirosari	Jl. Diponegoro No. 16 Wirosari
5. Kantor Cabang Ngaringan	Jl. Raya Prwodadi-Blora No. 58 Ngaringan
6. Kantor Cabang Kradenan	Jl. SuroJenggolo No. 04 Kuwu Kradenan
7. Kantor Cabang Gabus	Jl. Gathot Subroto No.99 Sulursari, Gabus
8. Kantor Cabang Grobogan	Jl. Pangeran Puger No. 187 Grobogan
9. Kantor Cabang Klambu	Jl. Komplek Pasar Kecamatan Klambu
10. Kantor Cabang Brati	Jl. Raya Kudus KM 35 Kecamatan Brati
11. Kantor Cabang Godong	Jl. Ahmad Yani No.51 Kecamatan Godong
12. Kantor Cabang Penawangan	Jl. Raya Penawangan No. 85 Penawangan
13. Kantor Cabang Karangrayung	Jl. Raya Karangrayung No.30 Karangrayung
14. Kantor Cabang Gubug	Jl. Suhada No.03 Gubug
15. Kantor Cabang Kedungjati	Jl. Perintis Kemerdekaan No.204 B Kedungjati
16. Kantor Cabang Tegowanu	Jl. Gatot Subroto No.49 Tegowanu
17. Kantor Kas Nglejok	Jl. A.Yani Komplek Pasar Nglejok Purwodadi
18. Kantor Kas Telawah	Ds. Welahan 0204 Telawah Karangrayung

19. Kantor Kas Putatsari	Ds. Babatan Putatsari
20. Kantor Kas Jeketro	Ds. Jeketro 0302 Gubug

MITRA USAHA BANK

Sebagai bagian dari strategi Bank, mitra usaha bank ditahun 2016 adalah:

1. Kerjasama dengan Bank Umum antara lain
 - PT. Bank Mandiri Capem Purwodadi
 - PT. Bank Syariah Mandiri
 - PT. Bank Negara Indonesia Capem Purwodadi
 - PT. Bank Jateng Kantor Cabang Purwodadi
 - PT. Bank Internasional Indonesia Cabang Kudus
 - PT. Bank Panin Capem Purwodadi
 - PT. Bank Danamon Capem Purwodadi
 - PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi
 - PT. Bank PANIN
 - PT. Bank BTN Capem Purwodadi
 - CIMB Niaga
2. Kerjasama dengan BPR milik Pemerintah Daerah antara lain
 - PD. BPR BKK Ungaran Kab. Semarang
 - PD. BPR Purwa Artha
 - PD. BPR BKK Lasem Kab. Rembang
 - PD. BPR BKK Mandiraja Kab. Banjarnegara
 - PD. BPR BKK Temanggung
3. Kejasama dengan PT POS Indonesia untuk kredit pensiun.
4. Kerjasama dengan BKD untuk kredit kepegawaian.
5. Kerjasama dengan PT Arindo untuk PPOB.
6. Kerjasama dengan Western Union untuk penerimaan kiriman uang.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan per 31 Desember 2016 jumlah karyawan Bank BKK Purwodadi adalah sebanyak 302 orang termasuk didalamnya 1 orang Dewan Pengawas. Berikut rincian jumlah karyawan Bank BKK Purwodadi berdasarkan jabatannya:

NO	KETERANGAN	UNIT KERJA			JUMLAH
		Kantor Pusat	KPO	Kantor Cabang	
1	Dewan Pengawas	1			1
2	Direksi	3			3
3	Pejabat Eksekutif	5	1	17	23
4	Kepala Seksi	16	5	37	58
5	Staf	11	14	92	117
6	Pegawai Kontrak	-	5	27	32
7	Non Staf	20	-	48	68
Jumlah		56	25	221	302

Tabel jumlah karyawan per 31 Desember 2016

Pada tahun 2016 Bank telah melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik pelatihan internal maupun melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan seperti PERBAMIDA/PERBARINDO. Pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Tanggal	Nama Kegiatan	NOMINAL
15 Januari 2016	Diklat Mediasi di UNTAG Semarang	7.110.000
27 Januari 2016	Literasi Edukasi Keuangan Kred UMKM	5.887.000
09 Feb 2016	Appraisal dan Analisis Kredit	5.710.000
07 Maret 2016	Pendidikan Basic Teller Tk. Dasar I	2.100.000
21 Maret 2016	Pelatihan Manris di Bandungan	120.870.558
24 Maret 2016	Pelatihan e-Felling pajak Online	3.104.000
24 Maret 2016	Beauty Class karyawan	12.256.000
26 Maret 2016	Sosialisasi UU ITE	15.000.000
31 Mei 2016	Rakernas & seminar Perbarindo	5.466.000
31 Mei 2016	Pelatihan Spiritual Leadership	109.670.000
01 April 2016	Uji Kompetensi Kasi Bank	22.989.000
22 April 2016	Training Komunikasi Investigasi Satpam	2.300.000
Sub total		312.462.558

Tanggal	Nama Kegiatan	NOMINAL
Lanjutan.....		312.462.558
30 April 2016	Diklat pegawai 17-23 April	10.100.000
	Diklat pegawai 17-23 April	10.100.000
	Diklat pegawai 24-30 April	10.100.000
17 Mei 2016	Pelatihan Kasir ttg Menris	2.729.000
01 Juni 2016	Pelatihan & Ujian Sertifikasi	14.315.000
	Diklat Pegawai 8-14 Mei	10.100.000
	Diklat Pegawai 16-21 Mei (4org)	20.200.000
03 Juni 2016	Sosialisasi Manajemen Risiko (Satpam)	240.000
04 Juni 2016	Sosialisasi LHKPN di Jogjakarta	3.000.000
21 Juni 2016	Implementasi lap Action Plan (17-18 Juni)	2.470.000
28 Juni 2016	Pelatihan Implementasi Manajemen Risiko	6.570.000
14 Juli 2016	Taktik & Strategi Pencapaian Target	141.291.010
30 Juli 2016	Pembinaan dan sosialisasi produk KMB	11.718.116
29-Jul-16	B. Assesment Psikotes 6-8 feb (cad)	51.350.000
30 Juli 2016	Pembinaan dan sosialisasi produk KMB	46.416.884
29 Agustus 2016	Seminar masa depan BPR	18.610.300
30 Agustus 2016	Workshop Comprehensive Tax Managemer	6.050.000
02 Sep 2016	Sosialisasi M Transaksi	4.004.000
05 Sep 2016	Pengisian Aplikasi Kredit & Personal Brand	8.950.000
13 Sep 2016	Sosialisasi kejaksaan	10.000.000
14 Sep 2016	Pelatihan Camel	11.181.800
20 Sept 2016	Seminar Nasional TTG PP No. 34 2016	250.000
20 Sept 2016	Pelatihan High Presentation Skill	6.345.000
20 Sept 2016	Pelatihan Anti Fraud	3.880.000
21 Sep 2016	Biaya modul pelatihan menris	1.804.500
27 Sept 2016	Pelatihan implementasi OJK No.13/2015	75.863.000
27 Sept 2016	Pelatihan SOP Satpamdan bimtek	11.243.300
14-Okt-16	Pelatihan Teller 45-5 okt 2016	6.000.000
24-Okt-16	Pelatihan satpam Gada Pratama	17.000.000
28-Okt-16	Workshop audit intern bandung	21.370.000
10-Nop-16	AntiFroud & implementasi Audit internal	8.520.000
14-Nop-16	Pelatihan kKredit dan gadai emas	110.664.000
29-Nop-16	Pelatihan Motivation Training	88.002.658
04-Okt-16	Pelatihan Emerging Market Penetration	93.419.648
08-Okt-16	Pelatihan sertifikasi direktut angkatan 64	40.090.000
17-Okt-16	Peningkatan profesionalisme satpam	105.487.000
28-Nop-16	Pelatihan Public speaking 21-24 Nop 2016	19.400.000
28-Nop-16	Pelatihan APU PPT 16-17 Nop 2016	67.352.000
30-Nop-16	Pelatihan Anti Fraud (2 hari)	5.660.000
15-Des-16	Training Suherman sapri	75.837.425
16-Des-16	Pelatihan laporan GCG	1.350.000
24-Des-16	Training Strategi Komunikasi	87.500.000
Total		1.558.997.199

Tabel. Daftar Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016

KEBIJAKAN FASILITAS DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 148 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah nomor 98 tahun 2009 pasal 79 tentang Hak Penghasilan dan Penghargaan Direksi maka anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya adalah:

- Untuk Direktur Utama 2,5 kali gaji pokok tertinggi skala gaji pokok pegawai.
- Untuk Direktur adalah 80% dari gaji pokok Direktur Utama.

Sedangkan fasilitas-fasilitas yang diterima adalah :

- Perawatan kesehatan termasuk istri dan anak maksimal 2 jiwa.
- Kendaraan Dinas maksimal 2500 cc untuk bahan bakar solar atau 2000cc untuk bahan bakar bensin.
- Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan.
- Dalam pelaksanaannya penghasilan Direktur Utama sebanyak-banyaknya 2,5 kali penghasilan karyawan tertinggi.
- Penghasilan Direktur sebanyak-banyaknya 80% dari Direktur Utama.

Ketua Dewan Pengawas mendapatkan penghasilan 40% dari penghasilan Direktur Utama, sedangkan untuk Anggota Dewan Pengawas sebesar 80% dari Ketua Dewan Pengawas (pasal 59).

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan laporan keuangan sampai Desember 2016, PD.BPRBKK Purwodadi terus berusaha untuk menjaga keuntungan dan kesinambungan pertumbuhan bisnis bank yang berkelanjutan. Hal tersebut menjadi modal bagi bank untuk dapat berperan dalam kemaslahatan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehubungan dengan hal tersebut PD. BPR BKK Purwodadi berupaya mengelola aktiva dan pasiva dengan cermat, hati-hati dan optimal. Sehingga dengan prinsip tersebut, PD. BPR BKK Purwodadi memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi liabilitas tepat waktu, menjaga likuiditas dan memperoleh pendapatan dengan level risiko yang dapat diterima.

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	RENCANA Desember 2016	REALISASI Desember 2016	PENCAPAIAN %
Aset	593.643.051	595.956.425	100,39
Aset Produktif	566.725.164	588.048.872	103,76
Kredit Yang diberikan	482.491.951	475.814.077	98,62
Pinjaman Yang Diterima	11.440.544	23.258.979	203,30
Dana Pihak Ke III			
1. Tabungan	363.688.657	366.420.722	100,75
2. Deposito	103.408.938	114.598.800	110,82
Ekuitas	107.723.937	86.739.192	80,52

Tabel Laporan Posisi Keuangan Bank Per 31 Desember 2016

Pada akhir periode Desember Tahun 2016 Bank berhasil membukukan aset sebesar 100,39% dari rencana sebesar Rp.593.643.051,-ribu terealisasi sebesar Rp.595.956.425,-ribu. Salah satu yang mempengaruhi nominal aset adalah pencapaian aset produktif yang tercapai lebih dari 100% yaitu sebesar 103,76% yang terdiri dari penempatan pada bank lain dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito serta kredit yang diberikan dari rencana sebesar Rp.566.725.164,-ribu terealisasi sebesar Rp.588.048.872,-ribu. Kredit yang diberikan Bank tercapai sebesar 98,62% dari rencana sebesar Rp.482.491.951,-ribu terelisasi sebesar Rp.475.814.077,-ribu. Pada sisi pasiva, Simpanan yang berupa Tabungan tercapai sebesar 100,75%, dan Simpanan yang berupa Deposito tercapai 110,82%. Sedangkan Ekuitas Bank hanya tercapai sebesar 80,52%, berdasarkan pemantauan dewan pengawas hal ini disebabkan karena adanya rencana perubahan Modal Dasar Bank dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) belum disetujui oleh pemilik saham.

ASET

Aset PD. BPR BKK Purwodadi terdiri kas, pendapatan bunga yang akan diterima, penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan, aset tetap dan inventaris, serta aset lain-lain. Berikut tabel pencapaian rincian aset PD. BPR BKK Purwodadi tutup buku Desember tahun 2016.

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	RENCANA Desember 2016	REALISASI Desember 2016	CAPAIAN %
1	Kas	24.200.020	14.520.804	60,00
2	PBYAD	4.288.759	4.344.735	101,31
3	Penempatan Pada Bank	84.233.213	112.234.795	133,24
4	PPAP ABA	(588.632)	(548.490)	93,18
5	Kredit Yang Diberikan	482.491.951	475.814.077	98,62
6	KYD - Provisi adm	(6.889.379)	(5.977.163)	86,76
7	PPAP Kredit	(17.015.012)	(16.270.174)	95,62
8	Agunan Yang Diambil Alih	-	-	0,00
9	Aset Tetap dan Inventaris	28.621.230	23.967.001	83,74
10	Akumulasi Penyusutan	(14.119.651)	(13.403.167)	94,93
11	Aset Bidak Berwujud	169.025	206.578	122,22
12	Akumulasi Penyusutan	(148.020)	(122.802)	82,96
13	Aset Lain-Lain	8.399.547	1.190.231	14,17
	Total	593.643.051	595.956.425	100,39

Pencapaian Aset Per 31 Desember 2016

Pada laporan keuangan per akhir Desember 2016, kas Bank tercatat sebesar Rp.14.520.804,-ribu dari rencana sebesar Rp.24.200.020,-ribu sedangkan posisi kas terhadap jumlah aset sebesar 2,44%. PBYAD atau pendapatan bunga yang akan diterima pada periode Desember 2016 tercapai 101,31% dari rencana sebesar Rp.4.288.759,-ribu terealisasi sebesar Rp. 4.344.735,-ribu. Penempatan pada bank lain adalah sebesar Rp.112.234.795,-ribu tercapai sebesar 133,24% dari rencana sebesar Rp.84.233.213,-ribu, sedangkan posisi penempatan pada bank lain terhadap jumlah aset adalah sebesar 18,83%.

Pencapaian kredit yang diberikan per 31 Desember 2016 adalah sebesar 98,62% dengan nominal sebesar Rp.475.814.077,-ribu dari rencana sebesar Rp.482.491.951,-ribu. Pencapaian kredit yang belum optimal dihadapkan pada persentase NPL yang turun tipis dari bulan sebelumnya sehingga keadaan ini memaksa bank menambah dana cadangan risiko. Namun demikian jika dibandingkan dengan rencana pembentukan PPAP sebesar Rp.17.015.012,-ribu hanya terealisasi sebesar Rp.16.270.174,-ribu menunjukkan bank telah berupaya semaksimal mungkin untuk

mempertahankan kualitas kredit yang diberikan. Sedangkan posisi kredit terhadap total aset adalah sebesar 79,84%.

Pada periode 31 Desember 2016, aktiva tetap dan inventaris bank tercatat sebesar Rp.23.967.001,-ribu dengan pencapaian sebesar 83,74% dengan rencana sebesar Rp.28.621.230,-ribu. Sedangkan realisasi aset tidak berwujud bank tercapai sebesar 122,22% dari rencana sebesar Rp.169.025,-ribu terealisasi menjadi Rp.206.578,-ribu. Pada posisi yang sama Aset lain-lain bank yang terdiri dari Premi asuransi kesehatan, Premi asuransi cash in safe, sewa dibayar dimuka, piutang kepada perusahaan asuransi dan uang muka-uang muka lainnya hanya terealisasi sebesar Rp1.190.231,-ribu dari rencana sebesar Rp.8.399.547,-ribu.

KEWAJIBAN

Menurut PA.BPR Kewajiban merupakan utang masa kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik Bank yang mengandung manfaat ekonomi. Pos-pos kewajiban yang dimiliki oleh Bank BKK Purwodadi adalah Kewajiban segera, Utang bunga, Utang pajak, Simpanan, Pinjaman diterima, Kewajiban imbalan kerja dan Kewajiban lain-lain. Berikut Tabel Kewajiban Bank periode per 31 Desember 2016:

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	RENCANA Desember 2016	REALISASI Desember 2016	CAPAIAN %
1	Kewajiban Segera	4.549.784	3.614.255	79,44
2	Utang Bunga	480.804	483.018	100,46
3	Utang Pajak	-	733.856	0,00
4	Simpanan	467.097.595	481.019.522	102,98
5	Pinjaman Diterima	11.440.544	23.258.979	203,30
6	Kewajiban Imbalan Kerja	93.540	107.602	115,03
7	Kewajiban Lain-lain	2.256.847	-	0,00
Total		485.919.114	509.217.233	104,79

Kewajiban Per 31 Desember 2016

Pada tabel diatas *Kewajiban Segera* Bank sebesar 79,44% dari rencana sebesar Rp.4.549.784,-ribu terealisasi sebesar Rp.3.614.255,-ribu. Kewajiban segera bank sendiri terdiri dari tabungan berjangka yang telah jatuh tempo namun belum ditarik oleh nasabah sebesar Rp.15.102,-ribu, kewajiban kepada pemerintah sebesar Rp.316.818,-ribu, titipan nasabah sebesar Rp.610.028,-ribu, serta kewajiban segera lainnya sebesar Rp.2.672.305,-ribu. Sehingga dengan persentase pencapaian tersebut menurut Dewan Pengawas Bank dalam kategori cukup berhati-hati dalam pengelolaan liabilitas dan menyegerakan pemenuhan kewajiban-kewajiban jangka pendek.

Utang bunga bank tercatat sebesar Rp.483.018,-ribu dari rencana sebesar Rp.480.804,-. Sedangkan utang pajak sebesar Rp.733.856,-ribu terdiri dari kewajiban pajak badan atau PPh 25 badan bulan Desember 2016 yang belum dibayarkan sebesar Rp.460.780,-ribu dan PPh 29 Tahun 2016 sebesar Rp.273.076,-ribu. Dana pihak ke III pada periode Desember 2016 tercapai sebesar 102,98% dari rencana sebesar Rp.467.097.595-ribu terealisasi sebesar Rp.481.019.522,-ribu. Pinjaman diterima mengalami pencapaian sebesar 203,30% dari rencana sebesar Rp.11.440.544,-ribu terealisasi sebesar Rp. 23.258.979,-ribu. Pinjaman yang diterima itu berasal dari CIMB Niaga serta Bank BJB. Pencapaian pinjaman diterima ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya dipercaya oleh masyarakat setempat saja, tetapi juga bank umum diluar wilayah kabupaten Grobogan.

Kewajiban imbalan kerja tercatat sebesar Rp.107.602,-ribu tercapai sebesar 115,03% dari rencana sebesar Rp.93.540,-ribu. Hal ini menunjukkan bahwa Bank telah sesuai dengan SAK-ETAP bab 23 tentang imbalan kerja serta telah sejalan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013.

KINERJA LAPORAN LABA RUGI

Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan seluruh penghasilan dan beban Bank dalam satu periode. Sampai dengan akhir periode Desember Tahun 2016 laporan laba rugi Bank menunjukkan hasil yang memuaskan dengan pencapaian persentase selalu diatas seratus persen. Dari hasil kinerja ini kami sebagai Dewan Pengawas memberikan apresiasi kepada Manajemen, dari pengalaman tahun-tahun

sebelumnya Bank lebih berhati-hati dalam pengelolaan Bank. Berikut laporan laba rugi Bank BKK Purwodadi Periode Bulan Desember Tahun 2016:

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	RENCANA Desember 2016	REALISASI Desember 2016	CAPAIAN %
A.	Pendapatan Operasional	89.689.835	98.886.865	110,25
	1. Pendapatan Bunga	86.213.467	94.698.517	109,84
	2. Pendapatan lainnya	3.476.368	4.188.348	120,48
B.	Beban Operasional	68.112.993	76.209.965	111,89
	1. Beban Bunga	22.270.702	25.055.187	112,50
	2. Beban Restrukturisasi Kredit		54	
	3. Beban PPAP	3.804.954	7.768.768	204,18
	4. Beban Pemasaran	1.688.144	2.102.126	124,52
	5. Beban Administrasi & Umum	39.843.409	40.778.743	102,35
	6. Beban lainnya	505.784	505.086	99,86
C.	1. Laba Operasional	21.576.842	22.676.900	105,10
	2. Rugi Operasional	-	-	
D.	Pendapatan Non Operasional	4.843.814	5.591.129	115,43
	1. Keuntungan Penjualan	-	129.544	
	2. Pendapatan ganti rugi asuransi	-	144.133	
	3. Bunga Antar Kantor	4.805.277	5.095.195	106,03
	4. Lainnya	38.537	222.257	576,74
E.	Beban Non Operasional	4.921.726	5.455.801	110,85
	1. Kerugian Penjualan			
	2. Kerugian Penurunan Nilai			
	3. Bunga Antar kantor	4.554.560	5.095.195	111,87
	4. Lainnya	367.166	360.606	98,21
F.	1. Laba Non Operasional		135.328	
	2. Rugi Non Operasional	77.912		0,00
G.	1. Laba Tahun Berjalan	21.498.930	22.812.228	106,11
	2. Rugi Tahun Berjalan			
H.	Taksiran pajak Penghasilan	5.374.732	5.692.624	105,91
I.	Laba Bersih	16.124.198	17.119.604	106,17

Laporan Laba Rugi Per Desember 2016

Pada tabel diatas menunjukkan laba bersih Bank tercapai 106,17% dari rencana sebesar Rp.16.124.198,-ribu terealisasi sebesar Rp.17.119.604,-ribu. Pendapatan operasional Bank tercapai 110,25% dari rencana sebesar Rp.89.689.835,-ribu terealisasi sebesar Rp. 98.886.865,-ribu. Pendapatan operasional tersebut berasal dari pendapatan dari pengelolaan dana atau pendapatan bunga yang terhimpun sebesar Rp.94.698.517,-ribu atau tercapai sebesar 109,84% dari rencana sebesar Rp.

86.213.467,-ribu serta pendapatan lainnya yang terhimpun sebesar Rp.4.188.348,-ribu dari rencana sebesar Rp.3.476.368,-ribu atau tercapai sebesar 120,48%.

Periode bulan Desember 2016 persentase pencapaian beban operasional Bank turun tipis menjadi 111,89% dari pencapaian pada periode Juni 2016 sebesar 116,00% dari rencana sebesar Rp.68.112.993,-ribu terealisasi sebesar Rp.76.209.965,-ribu. Penurunan persentase tersebut merupakan bentuk usaha Bank untuk menekan beban seefisien mungkin. Beban-beban tersebut meliputi beban bunga bank yang tercatat sebesar Rp.25.055.187,-ribu dari rencana sebesar Rp.22.270.702,-ribu atau sebesar 112,50%. Beban PPAP yang melambung 204,18% dari rencana sebesar Rp.3.804.954,-ribu terealisasi sebesar Rp.7.768.768,-ribu. Beban pemasaran 124,52% dari rencana sebesar Rp.1.688.144,-ribu terealisasi sebesar Rp.2.102.126,-ribu. Beban administrasi dan umum 102,35% dari rencana sebesar Rp.39.843.409,-ribu terealisasi sebesar Rp. 40.778.743,-ribu. Serta Beban lainnya sebesar 99,86% dari rencana sebesar Rp. 505.784,-ribu terealisasi sebesar Rp. 505.086,-ribu.

Pendapatan Non Operasional bank tercapai 115,43% dari rencana sebesar Rp.4.843.814,-ribu menjadi Rp.5.591.129,-ribu. Pencapaian terbesar pada pendapatan non operasional bank adalah pada pendapatan non operasional lainnya yaitu sebesar 576,74% dari rencana sebesar Rp.38.537,-ribu terealisasi sebesar Rp.222.257,-ribu. Kemudian dilanjut pada keuntungan penjualan aset tetap dan inventaris sebesar Rp.129.544,-ribu dan pendapatan ganti rugi asuransi tabungan berjangka sebesar Rp.144.133,-ribu. Sedangkan beban non operasional bank terealisasi sebesar 110,85% dari rencana sebesar Rp.4.921.726,-ribu menjadi Rp.5.455.801,-ribu. Pajak setelah audit Kantor Akuntan Publik adalah sebesar Rp.5.692.624,-ribu, sehingga laba bersih bank adalah sebesar Rp.17.119.604,-ribu dari rencana sebesar Rp. 16.124.198,-ribu atau tercapai sebesar 106,17%.

ANALISA RASIO KEUANGAN BANK

Analisa tingkat kesehatan bank bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisa tingkat kesehatan Bank tersebut meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

PERMODALAN atau CAPITAL

Permodalan bank diukur dalam CAR atau Capital Adequency Ratio. Pada periode Desember 2016 CAR bank berada pada level 18,78% tercapai 80,45% dari rencana sebesar 23,34%. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurang tercapainya rasio CAR adalah rencana penambahan Modal Dasar bank dari Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar rupiah) belum disetujui oleh pemilih saham, Sehingga walaupun ada pencapaian laba yang signifikan belum mampu menambah komponen persentase permodalan bank. Namun demikian permodalan bank masih jauh di atas batas minimal kategori sehat yaitu di atas 12%.

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

Penilaian kualitas aktiva produktif menggunakan rasio kualitas aktiva produktif (KAP) dan rasio Penyisihan dan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sampai dengan periode Desember 2016 rasio KAP Bank sebesar 4,67% atau meningkat sebesar 69,72% dari rencana sebesar 2,75%. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas aktiva produktif yang direncanakan Bank belum dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian Kualitas Aktiva Produktif Bank masih tergolong *SEHAT*. Sedangkan ratio PPAP Bank terhadap PPAPWD adalah sebesar 100,00% dari rencana sebesar 111,13% atau tercapai sebesar 89,99% hal ini sesuai dengan himbauan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa Bank minimal harus membentuk PPAP sebesar 100,00%.

MANAJEMEN

Penilaian faktor manajemen meliputi 10 aspek manajemen umum dan 15 aspek manajemen risiko. Hasil laporan intern bank, sampai dengan laporan tutup bulan Desember 2016 rasio manajem Bank pada aspek manajemen umum sebesar 30% dan

pada aspek manajemen risiko sebesar 48% sehingga penilaian manajemen bank sebesar 78%.

RENTABILITAS

Penilaian terhadap rentabilitas bertujuan untuk menilai tingkat keuntungan dan efisiensi operasionalnya melalui ratio ROA, ROE, NIM dan BOPO. Sampai tutup bulan Desember 2016, ROA bank sebesar 3,92% tercapai sebesar 93,06% dari rencana sebesar 4,21%, dengan kategori *SEHAT*. Sedangkan ROE bank tercapai sebesar 146,44% dari rencana sebesar 20,07% terealisasi sebesar 29,39%. Hal ini menunjukkan bank mampu mengelola modal dan cadangan umum dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan laba setelah pajak sesuai dengan yang direncanakan. NIM bank per Desember 2016 adalah sebesar 11,96% tercapai sebesar 104,77% dari rencana sebesar 11,42%. Pencapaian persentase tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktif sehingga mampu menghasilkan pendapatan bunga secara maksimal. Disisi penilaian biaya BOPO Bank per Desember 2016 sebesar 77,07% kelebihan 2,44% dari rencana sebesar 75,23% dengan kategori *SEHAT*.

LIKUIDITAS

Likuiditas bank diukur dengan *Cash Ratio*, dan *LDR*. Sampai dengan akhir Periode Desember 2016 cash ratio bank sebesar 5,42% dengan kategori *SEHAT*. Sedangkan Loan to deposit ratio atau LDR sebesar 81,69% dari rencana sebesar 83,45% dengan kategori *SEHAT*. Dari hasil kedua rasio tersebut menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek dan kemampuan bank dalam penyediaan dana untuk penyaluran kredit.

Berikut tabel tingkat kesehatan Bank per Desember 2016:

KETERANGAN	RENCANA Desember 2016	REALISASI Desember 2016	PENCAPAIAN %
CAR	23,34	18,78	80,45
KAP	2,75	4,67	169,72
RATIO PPAP	111,13	100,00	89,99
NPL	3,78	6,61	174,98
ROA	4,21	3,92	93,06
BOPO	75,23	77,07	102,44
NIM	11,42	11,96	104,77
ROE	20,07	29,39	146,44
CASH RATIO	14,89	5,42	36,41
LDR	83,45	81,69	97,89

Tingkat Kesehatan Bank per 31 Desember 2016

ANALISA NON PERFORMING LOAN

Non Performing Loan atau kredit macet merupakan keadaan dimana nasabah tidak mampu lagi membayar kewajibannya kepada bank, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Analisa Non Performing Loan atau NPL sangat penting untuk keberlangsungan usaha Bank, karena selain mempengaruhi rasio likuiditas dana pihak ke III, NPL juga mempengaruhi keuntungan bank. Sehingga sudah merupakan kewajiban bagi bank untuk menjaga rasio NPL bank agar tidak selalu meningkat.

Sampai dengan periode Desember 2016, rasio NPL bank adalah sebesar 6,61% dari rencana sebesar 3,78%. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi bank, karena pada periode sebelumnya atau periode Desember 2015 bank mampu mempertahankan NPL dibawah 5% yaitu sebesar 4,94%. Salah satu penyebab kenaikan NPL adalah tidak dilaksanakannya *arahan* dan *petunjuk* dari hasil evaluasi yang dilakukan Bank setiap awal bulan tentang budaya *continuous improvement* (perbaikan secara terus menerus) terhadap analisa kredit. Hal ini terlihat dari 1.941 orang nasabah kredit non lancar, terdapat 1.799 orang nasabah dengan kredit dibawah wewenang cabang, atau dari nominal kredit non lancar sebesar Rp.30.588.194,-ribu terdapat bagi debit sebesar Rp.23.371.324,-ribu berasal dari kredit dibawah wewenang cabang. Sehingga

kenaikan NPL pada beberapa cabang tidak dapat terkontrol. Berikut rincian kolektibilitas kredit sampai dengan bulan Desember 2016:

(dalam ribuan rupiah)

KETERANGAN	Lancar		Non Lancar		NPL
	Nominal	Orang	Nominal	Orang	
KPO	83.694.605	2.452	2.804.535	136	3,24
TOROH	25.265.127	1.484	994.420	94	3,79
GEYER	16.406.751	1.268	464.949	53	2,76
WIROSARI	32.104.352	2.019	585.390	36	1,79
TAWANGHARJO	22.285.992	1.643	1.094.107	94	4,68
NGARINGAN	19.287.524	1.318	1.003.403	71	4,95
KRADENAN	19.935.850	1.639	917.425	90	4,40
GABUS	25.329.848	1.998	573.072	46	2,21
PULOKULON	24.381.814	1.989	1.699.828	133	6,52
GROBOGAN	26.931.742	1.829	611.045	63	2,22
KLAMBU	16.578.930	956	1.122.940	66	6,34
BRATI	16.892.885	1.032	3.493.194	180	17,14
GODONG	17.525.341	1.007	3.482.432	181	16,58
PENAWANGAN	18.435.631	984	1.581.875	106	7,90
KARANGRAYUNG	25.471.794	1.755	1.812.601	170	6,64
GUBUG	25.363.588	1.315	1.753.844	65	6,47
KEDUNGJATI	17.242.266	1.240	1.587.750	142	8,43
TEGOWANU	11.208.138	706	5.889.089	342	34,44
TOTAL	444.342.178	26.634	31.471.899	2.068	6,61

Tabel 1. Rincian Kolektibilitas Kredit per 31 Desember 2016

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa NPL dengan rasio diatas 6,61% adalah berada pada kantor cabang Karangrayung sebesar 6,64%, Penawangan sebesar 7,90%, Kedungjati sebesar 8,43%, Godong 16,58%, dan Brati sebesar 17,14%. Sedangkan untuk kantor cabang Tegowanu, sejalan dengan hasil Audit SKAI tanggal 06 April 2016 NPL kantor Cabang Tegowanu naik menjadi 34,44%.

Selain itu, tindak lanjut manajemen terhadap kenaikan NPL adalah dengan pembagian pengawasan terhadap NPL seluruh kantor cabang yang dilakukan oleh Jajaran Direksi dan Kepala Bidang.

PENGUNGKAPAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DASAR PENGUKURAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Penyusunan dan penyajian atas laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (PA-BPR).

Dasar pengukuran dan pengakuan laporan keuangan adalah Biaya Historis dan disusun dengan dasar AkruaI. Laporan Keuangan BPR menggunakan mata uang rupiah penuh. Pada tanggal neraca aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode tidak langsung yang menyajikan informasi perubahan historis penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama satu periode. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan/pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsure penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan.

Konsep Dasar Pengukuran Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil dan kas dalam perjalanan. Kas dalam mata uang rupiah yang telah dicabut dan

ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran. Perlakuan akuntansi kas adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran
Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.
2. Penyajian
Kas disajikan dalam pos sendiri
3. Pengungkapan
Hal-hal yang diungkapkan adalah rincian jumlah kas.

Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan SAK ETAP tentang “Pengungkapan Pihak–Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”. Yang dimaksud dengan mempunyai hubungan istimewa adalah:

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada dibawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding companies*, *subsidiaries* dan *fellow subsidiaries*).
2. *Perusahaan Asosiasi (associated companies)*.
3. Perorangan yang memiliki, baik secara *langsung* maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara diperusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut. Yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perorangan tersebut.
4. Karyawan kunci, yaitu orang–orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat.
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan point 3 atau 4 atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan yang bersangkutan. Ini mencakup

perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor. Seluruh transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan kondisi persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.

Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual. SBI yang dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi diskonto dan ditambah biaya transaksi yang belum direalisasi. Sedangkan untuk SBI yang tersedia untuk dijual disajikan sebesar nilai wajarnya.

Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima

Merupakan pendapatan bunga BPR dari kredit dengan kualitas lancar (*performing*) serta penempatan pada bank lain yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya (*accrual basis*). Pendapatan bunga atas kredit yang diklasifikasikan sebagai non lancar (*Non Performing*) tidak diakui dalam akun sampai saat diterimanya pembayaran. Bunga atas kredit "Non Performing" di masukkan dalam rekening administrasi.

Penempatan pada bank lain untuk bank konvensional giro, tabungan, dan deposito diakui secara *accrual*, sedangkan penempatan pada Bank syariah giro (wadiah), tabungan (mudharabah) diakui secara kas deposito dan deposito diakui secara *accrual*.

Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain terdiri dari : giro pada bank umum, tabungan pada bank lain, deposito pada bank lain dan sertifikat deposito pada bank umum. Penempatan dana pada bank lain disajikan sebesar nilai nominal penyetoran atau nilai yang diperjanjikan sesuai jenis penempatan. Pendapatan bunga diakui

secara akrual sebesar jumlah yang menjad hak BPR. Amortisasi diskonto dilakukan secara garis lurus dan diakui sebagai Pendapatan Bunga.

Penyisihan Penghapusan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas dana yang ditempatkan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan dana pada bank lain tersebut (jika ada penurunan nilai atau kemungkinan kerugian).

Konsep dasar Pengukuran Penempatan pada bank lain berdasarkan SAK ETAP paragraf 2.12(a) dan SAK ETAP paragraf 20.27, sedangkan perlakuan akuntansi penempatan pada bank lain adalah:

1. Pengakuan dan pengukuran
 - Giro, tabungan dan deposito diakui sebesar nilai nominal
 - Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi hak BPR
2. Penyajian
 - Giro pada bank umum tidak disaling hapuskan dengan saldo simpanan yang diterima dari bank umum.
 - Giro pada bank umum yang bersaldo negatif disajikan dalam necara sebagai pinjaman diterima (kewajiban).
 - Penyisihan pada tabungan dan deposito pada bank lain dibentuk untuk menuuop kemungkinan kerugian dari tabungan atau deposito tersebut.
3. Pengungkapan
 - Rincian giro, tabungan, dan deposito.
 - Hubungan istimewa.
 - Jumlah giro, tabungan, dan deposito yan diblokir dan alasannya.

Kredit Yang Diberikan

BPR mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada kreditur sebesar plafond kredit yang diperjanjikan atau dapat ditarik sesuai jadwal penarikan / penggunaan kredit yang disepakati BPR dengan debitur. Nilai buku awal kredit yang diberikan diakui sebesar pokok kredit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang ditanggung BPR. Provisi

diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi diakui sebagai penambah Pendapatan Bunga.

Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai pengurang Pendapatan Bunga. Amortisasi Provisi dan Biaya Transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit itu termasuk performing atau non performing.

Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

Penyisihan kerugian kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan kualitas kredit dan nilai agunan yang tersedia. Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan. BPR wajib membentuk penyisihan kerugian kredit minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beban pembentukan penyisihan kerugian kredit disajikan setelah Beban Bunga pada pos Beban Penyisihan Kerugian Kredit. Saldo Penyisihan Kerugian Kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang diberikan. Penerimaan setoran kredit yang dihapus buku/ hapus tagih disajikan secara terpisah dalam Pendapatan Operasional Lainnya.

Agunan Yang Diambil Alih

Agunan Yang Diambil Alih adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

Agunan Yang Diambil Alih akan dicatat dalam neraca hanya yang berasal dari penyelesaian kredit. BPR wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Agunan Yang Diambil Alih yang dimiliki yaitu mengupayakan penjualan dengan segera serta mendokumentasikan upaya penyelesaian tersebut.

Agunan Yang Diambil Alih tidak disusutkan. Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat Agunan Yang Diambil Alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian non-operasional.

BPR wajib melakukan penilaian kembali secara berkala terhadap Agunan Yang Diambil Alih sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berkala dengan ketentuan. Dalam hal nilai Agunan Yang Diambil Alih mengalami penurunan, BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian. Dan dalam hal nilai Agunan Yang Diambil Alih mengalami peningkatan, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

Agunan Yang Diambil Alih yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun akan diperhitungkan sebagai komponen modal dalam perhitungan KPMM, sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia tentang KAP dan pembentukan PPAP BPR.

Aset Tetap

Aset Tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan (*cost*), sedangkan penyusutannya didasarkan pada *metode garis lurus* untuk bangunan dan Inventaris.

1. Tanah tidak disusutkan.
2. Golongan I disusut 25% dari harga perolehan.
3. Golongan II disusut 12,5% dari harga perolehan.
4. Golongan IV disusut 5% dari harga perolehan.

Dalam hal aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui pembelian secara tidak tunai, maka biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunai pada saat tanggal pengakuan. Aset tetap dan inventaris yang diperoleh dari sumbangan pemilik diakui sebagai bagian modal sumbangan. Sedangkan untuk aset tetap dan inventaris yang diperoleh bukan dari sumbangan pemilik dan diperoleh dari undian berhadiah diakui sebagai Pendapatan Non - operaioanal.

Perolehan aset melalui sewa pembiayaan (*financial lease*) merupakan aset tetap dan inventaris yang diperoleh melalui sewa (*lease*) apabila sewa tersebut

merupakan sewa pembiayaan dan harus memenuhi syarat agar dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Biaya perolehan aset tetap yang diperoleh melalui sewa adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa ditambah nilai residu (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa.

Aset tetap dan inventaris disajikan berdasarkan nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Surplus Revaluasi Aset Tetap disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Aset tetap dan inventaris yang berasal dari sewa pembiayaan disajikan tersendiri dalam pos Aset Tetap dan Inventaris. Kewajiban Sewa Pembiayaan disajikan dalam Pinjaman Yang Diterima.

Aset Lain - lain

Aset Lain - lain adalah pos - pos asset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok asset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Asset lain -lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca, meliputi rincian asset lain - lain dan kebijakan akuntansi yang melekat pada akun asset lain-lain.

Kewajiban Segera

Kewajiban segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Pengakuan terhadap kewajiban segera adalah pada saat kewajiban telah jatuh tempo atau kewajiban menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya, baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Kewajiban Segera disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Utang Bunga

Utang Bunga merupakan pos yang dimaksudkan untuk menambah kewajiban BPR yang timbul dari pengakuan biaya bunga dari aktivitas yang terkait dengan fungsi BPR. Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi seperti sewa pembiayaan, pinjaman diterima, pinjaman subordinasi dan modal pinjaman. Utang Bunga antara lain terdiri dari:

1. Kewajiban bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga)
2. Bunga deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah
3. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil

Utang Bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual , baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Utang Bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Utang Pajak

Utang pajak merupakan selisih kurang atas kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan angsuran pajak atau pajak dibayar dimuka. Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Utang Pajak sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Simpanan

Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran, sedangkan deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Beban bunga simpanan meliputi bunga kontraktual atas simpanan dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada simpanan tersebut. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga.

Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan. Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban

BPR yang diperjanjikan. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam Utang Bunga

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain adalah kewajiban BPR kepada bank lain, dalam bentuk tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos Pinjaman Diterima.

Pinjaman Diterima

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat distribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman dikurangi diskonto. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus dan diakui sebagai Beban Bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai Utang Bunga.

Pinjaman Diterima disajikan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos Utang Bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik (dimasukkan di rekening administratif).

Dana Setoran Modal – Kewajiban

Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyeter. Dana setoran modal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian ekuitas BPR.

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai Dana Setoran Modal-Kewajiban. Dana setoran modal yang telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai Dana Setoran Modal-Ekuitas. Dana setoran modal-kewajiban disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Modal Pinjaman

Modal pinjaman menimbulkan kewajiban kontraktual bagi BPR untuk menyelesaikannya dalam bentuk penyerahan kas dan setara kas. Keterbatasan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya atas modal pinjaman dengan adanya ketentuan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, tidak membatalkan kewajiban kontraktual tersebut.

Modal pinjaman diakui sebesar nilai pokok pinjaman. Bunga akrual atas modal pinjaman diakui sebagai Utang Bunga. Modal pinjaman disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan.

Kewajiban Lain – lain

Kewajiban Lain-lain merupakan pos yang dimaksudkan untuk menampung kewajiban BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada. Termasuk dalam Kewajiban Lain-lain antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah.

Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Kewajiban lain-lain disajikan secara gabungan, kecuali nilainya material maka wajib disajikan tersendiri dalam neraca.

Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan Kerja adalah bentuk imbalan yang diberikan BPR atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Sedangkan Kewajiban imbalan kerja adalah kewajiban yang timbul dari imbalan kerja. Dasar Pengaturan kewajiban imbalan kerja adalah SAK ETAP Bab 23 tentang Imbalan Kerja.

Dalam pengakuan dan pengukurannya, kewajiban imbalan kerja diakui pada saat pegawai telah memberikan jasanya kepada BPR dalam suatu periode dan berkurang pada saat dibayarkan. Kewajiban imbalan kerja dalam jangka pendek disajikan dalam pos kewajiban segera sebesar jumlah yang terutang, dalam jangka panjang disajikan dalam pos tersendiri sebesar jumlah yang

didiskontokan. Pada bulan laporan desember 2014 tidak ada tanggungan bank yang belum terbayarkan sehingga dalam pos kewajiban imbalan kerja sebesar nol rupiah.

Modal

Modal disetor merupakan bagian dari modal ditempatkan yang telah disetor penuh oleh pemegang saham. Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non – kas. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai nominal yang bersangkutan. Apabila jumlah yang diterima lebih besar daripada nilai nominalnya, maka selisihnya dibukukan pada akun Agio Saham.

Penyajian modal dalam neraca harus dilakukan sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar BPR dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, nilai nominal dan banyaknya saham untuk setiap jenis saham harus dinyatakan dalam neraca. Tambahan modal disetor disajikan dalam kelompok pos ekuitas. Modal sumbangan disajikan dalam kelompok pos ekuitas sesudah akun Tambahan Modal Disetor.

Dana Setoran Modal – Ekuitas

Dana Setoran Modal – Ekuitas merupakan dana setoran modal yang sebelumnya disajikan dalam komponen kewajiban dalam pos Dana Setoran Modal – Kewajiban. Dana Setoran Modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyeter. Sedangkan yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan merupakan bagian ekuitas BPR.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dan inventaris sebelum dilakukan revaluasi. Disajikan sebagai pos tersendiri dalam ekuitas. Pengungkapannya meliputi dasar yang digunakan, tanggal efektif revaluasi, pihak yang melakukan penilaian, jumlah

tercatat jenis aset tetap dan inventaris sebelum revaluasi dan jumlah surplus revaluasi aset tetap yang direklasifikasi ke saldo laba.

Saldo Laba

Saldo laba yang merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden, koreksi laba rugi periode lalu dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

Saldo laba yang merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian deviden, koreksi laba rugi periode lalu dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap disajikan tersendiri dalam bentuk cadangan tujuan, cadangan umum dan saldo laba yang belum ditentukan tujuannya.

Pendapatan Bunga

Pendapatan dan biaya bunga dihitung atas dasar *acrual basis*. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai “*Non Performing*” tidak diakui dalam akun sampai saat diterimanya pembayaran. Bunga atas aktiva produktif “*Non Performing*” di masukkan dalam rekening administrasi.

Pendapatan bunga meliputi antara lain pendapatn bunga kontraktual serta amortisasi provisi, diskonto dan biaya transaksi yang terkait dengan aset produktif, serta amortisasi pendapatan bunga tanggungan. Pendapatan bunga dari kredit yang masuk kategori performing diakui secara akrual, sedangkan dari kredit yang termasuk kategori non – performing diakui secara kas. Provisi sebagai penambah pendapatan bunga dan biaya transaksi sebagai pengurang pendapatan bunga diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus.

Pendapatan Non – Operasional

Pendapatan non – operasional berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sesuai dengan ketentuan, antara lain jasa pengiriman uang, pendapatan administrasi tabungan, denda kredit dan sebagainya. Pendapatan

non – operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR dan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

Beban Bunga

Beban bunga merupakan beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana dan penerimaan pinjaman. Beban bunga diakui secara akrual dan dinilai sebesar jumlah yang menjadi kewajiban BPR, termasuk beban lain yang dikeluarkan dalam rangka penghimpunan dana misalnya premi penjaminan simpanan, cash back, dan hadiah deposito berjangka. Beban bunga disajikan terpisah dari pendapatan bunga untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komposisi dan alasan perubahan nilai neto bunga.

Beban Non-Operasional

Beban non-operasional merupakan semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan kegiatan utama BPR, misalnya kerugian yang timbul sebagai akibat penilaian kembali kas dalam valuta asing, penjualan aset tetap dan inventaris BPR serta denda atau sanksi karena pelanggaran. Beban non-operasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan laba rugi.

Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan adalah jumlah agregat beban pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode. Beban Pajak Penghasilan diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan sebagai pos tersendiri dalam laporan laba rugi.

Reklasifikasi atas Pos-Pos Laporan Keuangan

BPR menerapkan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PA BPR, pos-pos tertentu dalam laporan keuangan tahun 2014 direklasifikasi berdasarkan pedoman terbaru yang telah ditetapkan.

LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERBANDINGAN TAHUN SEBELUMNYA

NECARA

		2016	2015
ASET		(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
Aset Lancar			
Kas	3.1	14.520.804	9.600.377
Kas dalam valuta asing	3.2		-
Sertifikat Bank Indonesia	3.2		-
PBYAD	3.2	4.344.735	3.845.600
Penempatan pada bank lain	3.3	112.234.795	84.685.041
Penyisihan Kerugian		(548.490)	(378.546)
Sub Jumlah		111.686.305	84.306.495
Kredit Yang Diberikan	3.4	475.814.077	422.686.932
Kredit Yang Diberikan - Provisi		(5.981.990)	
Kredit Yang Diberikan - Biaya Transaksi		4.827	
Penyisihan Kerugian Kredit		(16.270.174)	(10.834.706)
Sub Jumlah		459.543.903	411.852.226
Agunan Yang Diambil Alih	3.5		-
Aset Tetap & Inventaris	3.6		
Tanah		965.419	965.419
Gedung dan Bangunan		7.703.771	7.456.335
Inventaris		11.070.827	9.720.802
Kendaraan		4.226.984	4.584.093
Sub Jumlah		23.967.001	22.726.649
Akumulasi Penyusutan		(13.403.167)	(12.358.826)
Nilai Buku		10.563.834	10.367.823
Aset Tidak Berwujud	3.7	206.578	169.025
Ak. Aset tidak berwujud		(122.802)	(78.551)
Nilai Buku		83.776	90.474
			-
Aset Lain - lain	3.8	1.190.231	950.387
JUMLAH ASET		595.956.425	521.013.381

Tabel. Laporan Aset

		2016	2015
KEWAJIBAN		(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
Kewajiban			
Kewajiban Segera	3.9	3.614.255	3.198.732
Utang Bunga	3.10	483.018	412.349
Utang Pajak	3.11	733.856	1.027.681
Simpanan	3.12	481.019.522	421.729.983
Pinjaman diterima	3.13	23.258.979	17.494.875
Kewajiban Imbalan Kerja	3.14	107.602	-
Kewajiban Lain - lain	3.15		742
Jumlah Kewajiban		509.217.232	443.864.361
Ekuitas			
Modal	3.16		
Modal disetor		44.350.000	39.230.000
Tambahkan modal disetor			-
Modal sumbangan			-
Total		44.350.000	39.230.000
Dana Setoran Modal - Ekuitas	3.24		
Laba/rugi belum direalisasi	3.25		
Surplus revaluasi aset tetap	3.26		
Saldo laba	3.27		
Saldo laba	3.17		
Cadangan Umum		13.900.014	12.097.272
Cadangan Tujuan		11.369.574	9.763.777
Laba Ditahan			-
Laba Tahun Berjalan		17.119.604	16.057.970
Total		42.389.192	37.919.020
Jumlah Ekuitas		86.739.192	77.149.020
KEWAJIBAN & EKUITAS		595.956.425	521.013.381

Tabel. Laporan Kewajiban dan Ekuitas

LABA RUGI

		2016	2015
		(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan Bunga	4.1		
Bunga Kontraktual		87.137.482	74.218.937
Provisi & Komisi		7.561.035	6.602.484
Total		94.698.517	80.821.421
Beban Bunga	4.2	25.055.187	21.258.921
Pendapatan bunga neto		69.643.330	59.562.500
Pendapatan operasional lainnya	4.3	4.188.348	3.811.873
Jumlah Pendapatan Operasional		73.831.678	63.374.373
B. Penyshn Kerug/Penystn./Ditangguhkan	4.4		
B. Peny. Kerug. Tab/Dep/Sert. Dep		729.853	493.101
B. Kerugian Restrukturisasi Kredit		54	3.860.318
B. Penyshn Kerugian Kredit		7.038.915	3.860.318
B. Penyusutan		1.950.875	1.718.533
B. amortisasi tidak berwujud		44.251	42.256
Beban Pemasaran	4.5	2.102.126	1.822.120
Beban Administrasi dan Umum	4.6	39.288.704	33.908.091
Jumlah Beban Operasional		51.154.778	41.844.418
Laba (Rugi) Operasional		22.676.900	21.529.954
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPS.			
	4.7		
Pendapatan Non Operasional		495.934	4.890.364
Beban Non Operasional		(360.606)	(4.955.681)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Op.		135.328	(65.317)
LABA (RUGI) SBLM PAJAK THN BERJALAN		22.812.228	21.464.638
Beban Pajak Penghasilan		(5.692.624)	(5.406.667)
LABA (RUGI) STLH PAJAK THN BERJALAN		17.119.604	16.057.970

Tabel. Laporan Laba Rugi

REKENING ADMINISTRATIF

	2016	2015
	(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
KOMITMEN :		
Fasilitas pinj. yg ditrm & blm ditarik		
Fasilitas kred. kpd nsbh yg blm ditrk		
Jumlah Komitmen	-	-
KONTIJENSI :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
a. Bunga Kredit yang diberikan	6.644.810	4.315.141
b. Bunga Lainnya		
Aktiva Produktif yang dihapus buku	13.364.973	14.061.532
Penerusan Kredit (Channeling)		
Lain-lain yang bersifat administratif	1.180.543	1.180.543
Jumlah Kontinjensi	21.190.326	19.557.215

Tabel. Rekening Administratif

LAPORAN ARUS KAS

	2016	2015
	(Rp)	(Rp)
ARUS KAS DARI :		
Aktivitas Operasi :		
Laba Netto :	17119604	16.057.970
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih dari kegiatan operasi :		
Penyusutan Aset Tetap	1.044.341	1.577.644
Penyusutan Aset Tetap Tak Berujud	44.251	41.600
Penyisihan kerug. (pembalikan atas penyisihan) untuk:		
Penempatan pada bank lain (selain giro	169.944	191.871
Kredit	5.435.468	(2.204.147)
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi :		
Penempatan pada bank lain	(27.549.754)	(16.179.796)
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima	(499.136)	593.709
Kredit yang diberikan	(47.149.982)	(63.448.109)
Agunan yang diambil alih		300.000
Aset lain -lain	(239.844)	(194.495)
Kewajiban Segera	415.523	699.362
Utang Bunga	70.670	23.503
Utang Pajak	(293.825)	475.482
Simpanan	59.289.539	65.962.401
Pinjaman Dari Bank Lain	5.764.104	9.578.210
Kewajiban imbalan kerja	106.860	-
Kewajiban lain - lain		(187.067)
Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	13.727.763	13.288.138
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Pembelian/Penjualan Aset Tetap	(1.240.352)	(2.911.675)
Pembelian/Penjualan Aset Tidak Berwujud	(37.553)	-
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(1.277.905)	(2.911.675)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan :		
Penerimaan/pembayaran modal	5.120.000	-
Penerimaan/pembayaran cadangan	3.408.538	2.933.789
Pembayaran Deviden	(16.057.970)	(15.685.909)
Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(7.529.432)	(12.752.119)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	4.920.426	(2.375.656)
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KAS		
Kas pada awal periode	9.600.377	11.976.033
Kas pada akhir periode	14.520.804	9.600.377
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	(4.920.427)	2.375.656

Tabel. Laporan Arus Kas

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Uraian	Modal Disetor	Saldo Laba yang telah Ditentukan			Saldo Laba yang Belum Ditentukan	Jumlah Modal Bersih
		Cadangan Umum	Cadangan Tujuan	Laba Ditahan		
Saldo per 31 Desember 2014	39.230.000	10.371.822	8.555.438	-	15.685.909	73.843.169
Penambahan Modal	-	-	-	-	-	-
Cadangan Umum	-	1.725.450	-	-	-	1.725.450
Cadangan Tujuan	-	-	1.208.339	-	-	1.208.339
Laba Ditahan	-	-	-	-	-	-
Pembagian Deviden	-	-	-	-	(15.685.909)	(15.685.909)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	16.057.970	16.057.971
Saldo per 31 Desember 2015	39.230.000	12.097.272	9.763.777	-	16.057.970	77.149.020
Penambahan Modal	5.120.000	-	-	-	-	5.120.000
Cadangan Umum	-	1.802.741	-	-	-	1.802.741
Cadangan Tujuan	-	-	1.605.797	-	-	1.605.797
Laba Ditahan	-	-	-	-	-	-
Pembagian Deviden	-	-	-	-	(16.057.970)	(16.057.970)
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	17.119.604	17.119.604
Saldo per 31 Desember 2016	44.350.000	13.900.013	11.369.574	-	17.119.604	86.739.192

Tabel. Laporan Perubahan Ekuitas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Kas

	2016	2015
Kas terdiri atas :	(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
- Kantor Pusat	8.822.536	5.210.465
- Kantor Cabang Toroh	374.188	203.617
- Kantor Cabang Geyer	531.388	413.676
- Kantor Cabang Wirosari	313.468	96.833
- Kantor Cabang Tawangharjo	446.103	244.793
- Kantor Cabang Ngaringan	332.829	249.640
- Kantor Cabang Kradenan	293.481	254.165
- Kantor Cabang Gabus	391.609	287.269
- Kantor Cabang Pulokulon	525.444	342.926
- Kantor Cabang Grobogan	110.969	285.476
- Kantor Cabang Klambu	346.521	128.658
- Kantor Cabang Brati	235.515	173.328
- Kantor Cabang Godong	420.028	319.968
- Kantor Cabang Penawangan	92.172	213.273
- Kantor Cabang Karangrayung	308.661	152.592
- Kantor Cabang Gubug	206.070	656.320
- Kantor Cabang Kedungjati	410.595	246.038
- Kantor Cabang Tegowanu	359.228	121.341
Jumlah	14.520.805	9.600.377

Tabel. Rincian Kas

2. Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima (PBYAD)

	2016	2015
PBYAD atas :	(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
PBYAD - Kredit yang diberikan	4.110.717	3.636.569
PBYAD - Penempatan pada bank lain	234.018	209.031
Jumlah	4.344.735	3.845.600

Tabel 3. PBYAD

3. Penempatan Pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain terdiri dari:

1. Giro

	2016	2015
	(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
- PT. Bank Danamon	2.189.349	7.668.071
- PT. Bank Mandiri		27.471
- PT. Bank Negara Indonesia		488.026
- PT. Bank CIMB NIAGA	336.773	792.427
- Bank Jabar dan Banten (BJB)	11.558	
	2.537.680	8.975.996

Tabel. Rincian ABA (Giro)

2. Tabungan

	2016	2015
	(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
- PT. Bank Jateng	1.021.123	4.344.792
- PT. Bank Negara Indonesia	2.372.153	2.529.968
- PT. Bank Mandiri	1.135.625	9.834.317
- PT. Bank International Indonesia	1.972.739	3.608.124
- PT. Bank Panin	45.010	44.731
- PT. Bank Rakyat Indonesia	1.605.960	998.217
- PT. Bank Negara Indonesia (Transit P	-	482.408
- PT. Bank Mandiri Bisnis/ Water Org	-	848.346
- PT. Bank Tabungan Negara	53.280	51.080
- PT. Bank Syariah Mandiri	1.011.225	937.063
	9.217.115	23.679.045

Tabel. Rincian ABA (Tabungan)

3. Deposito

	2016	2015
	(Dalam ribuan)	(Dalam ribuan)
- PT. Bank Jateng	38.030.000	4.030.000
- PT. Bank Negara Indonesia	-	-
- PT. Bank Mandiri	24.000.000	35.000.000
- PT. Bank Rakyat Indonesia	30.700.000	5.500.000
- Bank Jabar dan Banten (BJB)	250.000	-
- PD. BPR BKK Ungaran	3.000.000	3.000.000
- PT. BPR Purwa Artha	500.000	500.000
- PD. BPR Mandiraja	3.000.000	3.000.000
- PT. Bank Syariah Mandiri	1.000.000	1.000.000
	100.480.000	52.030.000
Jumlah Penempatan Pada Bank Lain	112.234.795	84.685.041
Penyisihan Kerugian (non giro)	(548.490)	(378.546)
Total Penempatan Pada Bank Lain	111.686.305	84.306.495

Tabel. Rincian ABA (Deposito)

4. Penyisihan Kerugian Penempatan pada bank lain

(dalam ribuan rupiah)

Kolektibilitas Aktiva Produktif	31 Desember 2016	
	Penempatan pada Bank	PPAPWD
Lancar	109.697.115	548.486
Macet	-	-
Jumlah	109.697.115	548.486
Jumlah PPAP yang dibentuk bank	-	548.490
Jumlah PPAP yang lebih (kurang) dibentuk bank		4
Kolektibilitas Aktiva Produktif	31 Desember 2015	
	Penempatan pada Bank	PPAPWD
Lancar	75.709.045	378.545
Macet		
Jumlah	75.709.045	378.545
Jumlah PPAP yang dibentuk bank		378.545
Jumlah PPAP yang lebih (kurang) dibentuk bank		-

Tabel. Rincian Penyisihan Kerugian

Suku bunga Giro, Tabungan dan Deposito berkisar antara 0,50% sampai 10,25% per tahun untuk tahun 2016. Bank telah melakukan penyisihan kerugian yang mungkin timbul atas akun ini, dan manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya akun tersebut.

5. Kredit yang Diberikan

Kredit	Pokok	Provisi	B.Transaksi	2016	2015
<i>1) Kepada</i>					
BPR	-	-	-	-	-
Bank Umum	-	-	-	-	-
Pihak ke-3 Bukan Bank	475.814.077	5.981.990	4.827	469.836.914	422.686.932
	475.814.077	5.981.990	4.827	469.836.914	422.686.932
<i>2) Jenis Pinjaman</i>					
Modal Kerja	297.965.122	3.746.052	3.023	294.222.093	279.823.694
Investasi	-	-	-	-	-
Konsumsi	177.848.955	2.235.938	1.804	175.614.821	142.863.238
Lain-lain	-	-	-	-	-
Jumlah	475.814.077	5.981.990	4.827	469.836.914	422.686.932
<i>3) Sektor Ekonomi</i>					
Pertanian, Perburuan					
Pertanian dan Kehutanan	60.693.990	561.892	-	60.132.098	66.224.997
Industri Pengolahan	3.958.517	43.532	-	3.914.985	3.774.385
Perdagangan Besar dan	-	-	-	-	-
Perdagangan	227.399.688	2.446.080	4.638	224.958.247	205.615.950
Jasa Perorangan Lainnya	5.912.928	61.769	-	5.851.159	4.742.729
Bukan Lapangan	-	-	-	-	-
Usaha - Lainnya	177.848.955	2.868.718	188	174.980.426	142.328.871
Jumlah	475.814.078	5.981.991	4.826	469.836.915	422.686.932
<i>4) Hubungan</i>					
Pihak terkait	-	-	-	-	-
Pihak lain	475.814.077	5.981.990	4.827	469.836.914	422.686.932
Jumlah	475.814.077	5.981.990	4.827	469.836.914	422.686.932

Tabel. Rincian Kredit Yang Diberikan

Tingkat Kolektibilitas Pinjaman yang diberikan sebelum Penyisihan Kerugian Kredit yang diberikan sebagai berikut:

Kolekbilitas	2016		2015	
	(Dalam Ribuan)	%	(Dalam Ribuan)	%
Lancar	444.342.178	93,39	406.935.982	95,06
Kurang Lancar	4.984.899	1,05	3.778.430	0,88
Diragukan	6.607.125	1,39	3.749.771	0,88
Macet	19.879.874	4,18	13.638.026	3,19
Total	475.814.076	100,00	428.102.209	100,00

Tabel. Rincian Kolekbilitas

Suku bunga kredit pegawai 9,00% per tahun sedangkan untuk pinjaman umum 11,50% sampai dengan 23,50% per tahun untuk tahun 2015. Jangka waktu kredit berkisar antara 3 bulan sampai 6 tahun.

Bank telah membentuk penyisihan penghapusan kredit dan manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit yang telah

dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Penyisihan Kerugian Kredit Yang Diberikan

	2016 (Dalam ribuan)	2015 (Dalam ribuan)
Saldo Awal	10.834.706	13.038.853
Penyisihan Selama Tahun Berjalan	7.038.915	3.860.317
Penghapusbukuan Yang dilakukan	-	(2.915.605)
Pengembalian kelebihan peny Kerugian Kredit	(1.603.446)	(3.148.859)
Jumlah	16.270.175	10.834.706

Tabel 4. Penyisihan Kerugian

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan penghapusan kredit yang diberikan yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

Perhitungan Penyisihan Kerugian Kredit 31 Desember 2016

Kolektibilitas Aktiva Produktif	KYD	AK.PROD	Nilai Agunan	PPAPWD
	Nominal	Klasifikasi	Nominal	Nominal
Lancar	444.342.178	-	-	2.221.711
Kurang Lancar	4.984.899	2.492.450	2.726.503	225.840
Diragukan	6.607.125	4.955.344	3.150.756	1.728.185
Macet	19.879.874	19.879.874	7.785.888	12.093.986
Jumlah	475.814.077	27.327.668	13.663.147	16.269.722
Jumlah PPAP yang dibentuk bank				16.270.174
Jumlah PPAP yang lebih dibentuk bank				453
Rasio PPAPWD				100,00%
Rasio KAP				4,67%
Rasio NPL Bruto				6,61%
Rasio NPL Netto				3,66%

Tabel. Penyisihan Kerugian Kredit Tahun 2015

Ratio NPL bruto meningkat sebesar 1,67% dari tahun 2015 sebesar 4,94% menjadi sebesar 6,61% untuk tahun 2016. Namun demikian bank senantiasa melakukan penagihan secara intensif.

Perhitungan Penyisihan Kerugian Kredit 31 Desember 2015

(dalam ribuan rupiah)

Kolektibilitas Aktiva Produktif	KYD	AK.PROD	Nilai Agunan	PPAPWD
	Nominal	Klasifikasi	Nominal	Nominal
Lancar	406.935.982	-	-	2.034.680
Kurang Lancar	3.778.430	1.889.215	2.035.020	174.341
Diragukan	3.749.771	2.812.328	1.523.841	1.112.965
Macet	13.638.026	13.638.026	6.132.080	7.505.946
Jumlah	428.102.209	18.339.569	9.690.941	10.827.932
Jumlah PPAP yang dibentuk bank				10.834.706
Jumlah PPAP yang lebih dibentuk bank				6.774
Rasio PPAPWD				100,06%
Rasio KAP				3,64%
Rasio NPL Bruto				4,94%
Rasio NPL Netto				2,89%

Tabel. Penyisihan Kerugian Kredit Tahun 2014

6. Aset Tetap

	31-Des-15 (dml Ribuan)	+	-	31-Des-16 (dml Ribuan)
Harga Perolehan				
Tanah	965.419	-	-	965.419
Gedung dan Bangunan	7.456.335	247.436	-	7.703.771
Inventaris	9.720.802	1.350.025	-	11.070.827
Kendaraan	4.584.093	494.050	851.159	4.226.984
Jumlah Harga Perolehan	22.726.649	2.091.511	851.159	23.967.001
	-	-	-	-
Ak. Penyusutan	-	-	-	-
Ak. Peny. Gdng & Bngnn	2.392.836	353.440	-	2.746.276
Ak. Penyusutan Inventaris	7.159.885	1.009.339	-	8.169.224
Ak. Penyusutan Kendaraan	2.806.105	58.154	376.592	2.487.667
Jumlah Ak. Penyusutan	12.358.826	1.420.933	376.592	13.403.167
	-	-	-	-
Nilai Buku	10.367.823	-	-	10.563.834

Tabel. Rincian Aset tetap

7. Aset Tidak Berwujud

	2016 (Dalam ribuan)	2015 (Dalam ribuan)
Aset tidak berwujud	206578	169.025
Akumulasi aset tidak berwujud	(122802)	(78.551)
Nilai Buku	83.776	90.474

Tabel. Aset Tidak Berwujud

8. Aset Lain-lain

	2016 (Dlm rbn)	2015 (Dlm rbn)
Premi Penjmnn LPS Dibyr Dimuka		2.180
Pajak Dibayar Dimuka		-
Biaya Dibayar Dimuka :		-
- Premi Asuransi Purna Bhakti		-
- Premi Asuransi Kesehatan	4.847	-
- Premi Asuransi Aset		-
- Premi Asuransi Cash in Safe	14.526	4.842
- Premi Asuransi Jaminan Hari Tua		-
- Premi Asuransi Tab Berjngk		-
- Sewa Dibayar Dimuka	30.297	42.914
Piutang Kpd Pershn Asuransi	127.509	175.762
Lainnya :		-
- Uang Muka Persediaan meterai	17.604	19.110
- Uang Muka WU (Western Union)	85.814	333.254
- Uang Muka Inventaris	12.000	16.500
- Uang Muka Pure IT	491.054	-
- Lainnya :		-
* Uang Muka Pusat Operasional		-
* Uang Muka Pakaian Dinas	164.000	158.325
* Uang Muka Kalender	198.800	172.500
* Uang Muka Seragam Security		25.000
* Uang Muka Penyalahgunaan		-
* Uang Muka Pembahasan SOP	9.000	-
* RRA Sony Penawangan	34.780	-
Jumlah	1.190.231	950.387

Tabel. Aset Lain-Lain

9. Kewajiban Segera

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Tab berjangka yang telah jatuh tempo namun	15.102	
Kewajiban kpd Pemerintah yg hrs dibayar:		
- Titipan PPh Ps. 25		
- Titipan PPh Ps. 4(2) - Tabungan & Deposito	315.354	276.499
- Titipan PPh Ps. 21 (Karyawan)		-
- Titipan PPh Ps. 21 (Insentif)	1.465	1.611
Titipan Nasabah:		-
-Titipan Asuransi Kredit Musiman	37.789	36.511
-Titipan Asuransi Kredit Bulanan	247.581	131.678
-Titipan Asuransi Tabungan Berjangka	355	270
-Titipan Biaya Notaris/Legalisasi	7.550	850
-Titipan Setoran Online	200.727	92.644
-Titipan Setoran Nasabah	116.026	35.882
-Titipan PPOB (Payment Point Online Bank)	17.571	12.664
-Titipan WU (Western Union)	84.604	318.886
-Titipan hutang pajak deposito (accrual)	-	-
-Water Org	339.146	99.833
-Lainnya:		-
* Titipan Lainnya		-
* Sewa Mobil Dinas		-
* Titipan PPh Ps. 23 (Sewa)		-
* Titipan DPLK		-
* Titipan kesejahteraan karyawan	2.186.274	2.187.984
* Dana GNOTA siswa SD, SMA dan SMK	15.300	-
* Transport lomba mewarni	410	-
* Bantuan beasiswa kurang mampu	29.000	-
* Titipan mandiri yg blm diambil gbs		-
* Kelebihan ttpn bunga dep An. Teddy S		109
* Dana Bansos Lembaga Pnddkn Keagamaan		3.250
* Asuransi Nasabah BKK AIR (Kredit Jamban)		62
Jumlah	3.614.254	3.198.732

Tabel. Kewajiban Segera

10. Utang Bunga

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Bunga Deposito :		
Bunga Deposito Pihak Ke-III Bukan Bank	483.018	412.349
Bunga Deposito ABP		
Pinjaman yang diterima		
Jumlah	483.018	412.349

Tabel. Rincian Utang Bunga

11. Utang Pajak

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
- PPh Pasal 25 Bulan Desember	460.780	420.558
- PPh Pasal 29 Kurang bayar	273.076	607.123
Jumlah	733.856	1.027.681

Tabel. Rincian Utang Pajak

12. Simpanan

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Tabungan terdiri atas :		
- Tamades	312.366.586	283.575.582
- TabunganKu	26.751.108	16.365.256
- Tabungan wajib	22.343.421	19.795.551
- Cibi Save	827.161	897.158
- Tabungan SiswaKu	3.530.913	1.600.774
- BKK Umroh	601.535	226.162
Jumlah	366.420.724	322.460.483
Deposito terdiri atas :		
Pihak terkait		-
Pihak lain	114598800	99.269.500
Jumlah	114.598.800	99.269.500
		-
Total	481.019.524	421.729.983

Tabel. Rincian Simpanan Pihak Ke III

Suku bunga tabungan berkisar antara 3,25 % sampai dengan 4,75 % per tahun untuk tahun 2015. Suku bunga deposito berkisar antara 6,50% sampai dengan 7,50% per tahun untuk tahun 2016. Deposito berjangka dari pihak terkait dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal seperti dari pihak lain.

13. Pinjaman Di Terima

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Pinjaman Yang Diterima	23.258.979	17.494.875
Total	23.258.979	17.494.875

Tabel. Pinjaman Yang Diterima

Merupakan pinjaman diterima dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 011/PK/ML2/SMG/15 tanggal 09 Oktober 2015 dengan Plafon Rp15.000.000.000,00 dan Rp.5.000.000.000,00 dalam jangka waktu 10 tahun dengan bunga sebesar 11,5% per tahun. Serta merupakan pinjaman dari PT Bank Jabar sesuai dengan Perjanjian Kredit No.5 tanggal 14 April 2016 dengan plafon Rp.15.000.000.000,00 dalam jangka waktu 10 tahun bunga sebesar 11,35% pertahun.

14. Kewajiban Imbalan Kerja

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Cadangan Jasa Pengabdian	107.602	742
Total	107.602	742

Tabel. Kewajiban Imbalan Kerja

Ratio Perkembangan KYD terhadap Dana

POS-POS NERACA	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Simpanan pihak ke III :		
Deposito berjangka	114.598.800	99.269.500
Tabungan	366.420.722	322.460.483
Pinjaman diterima lebih dari 3 bulan *)	23.258.979	17.494.875
Modal Pinjaman	-	-
Modal Inti	78.179.390	69.120.035
Jumlah Dana (JD)	582.457.891	508.344.893
Kredit yang diberikan :		
Kredit yang diberikan **)	475.814.077	428.102.209
Kredit yang diberikan kepada bank lain **)		-
Jumlah kredit yang diberikan (JK)	475.814.077	428.102.209
Kas	14.520.804	9.600.377
Penempatan pada bank lain :		
Giro	2.537.680	8.975.996
Tabungan ***)	9.217.115	23.679.045
Jumlah Alat Likuid (JAL)	26.275.599	42.255.418
Kewajiban Lancar :		
Kewajiban segera	3.614.255	3.198.732
Tabungan pihak ketiga	366.420.722	322.460.483
Deposito pihak ketiga	114.598.800	99.269.500
Jumlah Kewajiban Lancar (JKL)	484.633.777	424.928.715
LDR (JK:JD) x 100%	81,69%	84,21%
Cash Ratio (JAL:JKL) x 100%	5,42%	9,94%

Tabel. KYD Terhadap Dana

- *) Termasuk dana Antar Bank dan surat berharga yang diterbitkan tetapi tidak termasuk subordinasi.
- **) Termasuk kredit konsorsium menurut pangsanya tapi tidak termasuk kredit kelolaan (channeling)
- ***) Merupakan saldo netto antara tabungan pada ABA dengan ABP namun ABP>ABA maka saldo diperhitungkan Nihil.

LDR tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,52% dari tahun 2015 sebesar 84,21% menjadi sebesar 81,69% untuk tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp

47.711.867,-ribu dan peningkatan dana yang diterima sebesar Rp 74.112.998,-ribu.

Cash Ratio tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4,52% dari tahun 2015 sebesar 9,94% menjadi sebesar 5,42% untuk tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya penurunan alat likuid sebesar Rp15.979.818,-ribu dan peningkatan kewajiban lancar sebesar Rp 59.705.062,-ribu dari tahun sebelumnya.

15. Modal

Modal terdiri atas:

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000
Modal dasar yg belum disetor	(5.650.000)	(10.770.000)
Modal Disetor	44.350.000	39.230.000

Tabel. Rincian Modal Dasar

Perhitungan CAR bank 31 Desember 2016:

(dalam ribuan

rupiah)

ASET	Jumlah setiap komponen	Bobot Nilai setiap komponen	Jumlah
Kas	14.520.804	0%	-
Pendapatan Yang Akan Diterima	4.344.735	100%	4.344.735
Giro pada Bank lain	2.537.680	20%	507.536
Penempatan pada Bank lain	109.697.115	20%	21.939.423
Kredit yang diberikan	-		-
- Kredit Pegawai / Pensiun	-	50%	-
- Kredit Usaha Kecil / UMK	461.766.066	85%	392.501.156
- Kredit Lainnya	-	100%	-
Aset Tetap, nilai buku	10.563.834	100%	10.563.834
Aset Tak Berwujud	83.776	100%	83.776
Aset Lain-lain	1.190.231	100%	1.190.231
Jumlah ATMR	604.704.241		431.130.691
EKUITAS	-		-
Modal Inti :	-		-
Modal disetor	44.350.000	100%	44.350.000
Modal sumbangan	-	100%	-
Cadangan umum	13.900.014	100%	13.900.014
Cadangan tujuan	11.369.574	100%	11.369.574
Laba ditahan	-	100%	-
Laba tahun lalu	-		-
Laba tahun berjalan	17.119.604	50%	8.559.802
Jumlah Modal Inti	86.739.192		78.179.390
Modal Pelengkap :	-		-
Cadangan revaluasi aset tetap	-		-
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	2.770.196	100%	2.770.196
Umum Max (1,25% X ATMR)	-		-
Modal kuasai/modal pinjaman	-	100%	-
Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	-	50%	-
Jumlah Modal Pelengkap	2.770.196		2.770.196
Jumlah Modal Pelengkap Yang			2.770.196
Jumlah Modal			80.949.586
Modal Minimum (8% X ATMR)			51.735.683
Kelebihan Modal			29.213.904
Rasio Modal (CAR)			18,78%

Tabel. Perhitungan CAR Tahun 2016

(dalam ribuan
rupiah)

ASET	Jumlah setiap komponen	Bobot Nilai setiap komponen	Jumlah
Kas	9.600.377	0%	-
Pendapatan Yang Akan Diterima	3.845.600	100%	3.845.600
Giro pada Bank lain	8.975.996	20%	1.795.199
Penempatan pada Bank lain	75.709.045	20%	15.141.809
Kredit yang diberikan	-		-
- Kredit Pegawai / Pensiun	-	50%	-
- Kredit Usaha Kecil / UMK	419.308.957	85%	356.412.614
- Kredit Lainnya	-	100%	-
Aset Tetap, nilai buku	10.367.823	100%	10.367.823
Aset Tak Berwujud	90.474	100%	90.474
Aset Lain-lain	950.387	100%	950.387
Jumlah ATMR	528.848.659		388.603.905
EKUITAS	-		
Modal Inti :	-		
Modal disetor	39.230.000	100%	39.230.000
Modal sumbangan	-	100%	-
Cadangan umum	12.097.272	100%	12.097.272
Cadangan tujuan	9.763.777	100%	9.763.777
Laba ditahan	-	100%	-
Laba tahun lalu	-		-
Laba tahun berjalan	16.057.970	50%	8.028.985
Jumlah Modal Inti	77.149.020		69.120.035
Modal Pelengkap :	-		
Cadangan revaluasi aset tetap	-		
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	2.413.225	100%	2.413.225
Umum Max (1,25% X ATMR)	-		-
Modal kuasai/modal pinjaman	-	100%	-
Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dari modal inti)	-	50%	-
Jumlah Modal Pelengkap	2.413.225		2.413.225
Jumlah Modal Pelengkap Yang			2.413.225
Jumlah Modal			71.533.260
Modal Minimum (8% X ATMR)			31.088.312
Kelebihan Modal			40.444.948
Rasio Modal (CAR)			18,41%

Tabel. Perhitungan CAR Tahun 2015

Saldo Laba

Merupakan saldo laba oleh bank pada tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Cadangan Umum	13.900.014	12.097.272
Cadangan Tujuan	11.369.574	9.763.777
Laba Yang Belum Direalisasi :		-
- Laba Ditahan		-
- Laba tahun berjalan	17.119.604	16.057.970
Saldo Akhir	42.389.192	37.919.020

Tabel. Perhitungan Laba

PENJELASAN POS-POS LABA RUGI

1. Pendapatan bunga

Jumlah tersebut merupakan pendapatan bunga penempatan pada bank lain yang diperoleh selama periode tahun berjalan dengan perincian sebagai berikut:

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Kepada Bank Lain :		
- Giro	282.638	423.363
- Tabungan	386.481	424.326
- Deposito Berjangka	5.469.195	3.557.444
Total	6.138.314	4.405.133
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		-
- Kredit yang diberikan	80.999.168	69.813.804
Jumlah Pendapatan Bunga	87.137.482	74.218.937
Provisi	7568034	6.610.201
Biaya transaksi	-7000	(7.717)
Jumlah	7.561.035	6.602.484
Total	94.698.517	80.821.421

Tabel. Pendapatan Bunga

2. Beban Bunga

Jumlah tersebut merupakan beban bunga kepada bank lain dan pendapatan bunga kredit yang diperoleh selama periode tahun berjalan yang berasal dari:

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank		
Tabungan	12515079	11.903.631
Deposito	8021174	7.322.579
Pinjaman Diterima	2690521	342.014
Lainnya	946574	777.068
Biaya Transaksi	67222	63.201
Koreksi Atas Pendapatan Bunga	814616	850.428
Total Beban Bunga	25.055.186	21.258.921

Tabel. Beban Bunga

3. Pendapatan Operasional lainnya

Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional bank selama periode tahun berjalan dengan rincian:

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Pendapatan jasa transaksi	72.253	91.485
Penerimaan kredit yg dihapusbukukan	1.209.605	973.876
PPAP	2.019.450	1.928.641
Lainnya:	-	-
- Administrasi tabungan	486.961	473.635
- Administrasi tutup rekening tabungan	12.141	11.131
- Sanksi atau denda kredit	29.426	318.307
- Penalty deposito	358.512	14.798
- Selisih nominatif beban bunga deposito yang masih harus	-	-
- Penerimaan lainnya	-	-
Jumlah	4.188.348	3.811.873

Tabel. Pendapatan Operasional Lainnya

4. Beban Penyisihan Kerugian/Penyusutan

Jumlah tersebut merupakan beban penyisihan kerugian/penyusutan selama periode tahun berjalan dengan rincian:

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Beban Peny Kerug Tab/dep/Sert dep	729.853	493.101
Beban kerugian restrukturisasi kredit	54	-
Beban Penyisihan Kerugian Kredit	7.038.915	3.860.318
Beban Penyusutan Gedung	353.612	317.570
Beban Penyusutan Inventaris	1.009.167	931.680
Beban Penyusutan Kendaraan	588.096	469.283
Beban amortisasi tidak berwujud	44.251	42.256
Jumlah	9.763.948	6.114.208

Tabel. Beban Penyisihan Kerugian

5. Beban Pemasaran

Jumlah tersebut merupakan beban pemasaran selama periode tahun berjalan sebesar :

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Beban Hadiah dan Promosi	2.102.126	1.822.120
Jumlah	2.102.126	1.822.120

Tabel. Beban Pemasaran

6. Beban Administrasi dan Umum

Jumlah tersebut merupakan beban administrasi dan umum selama periode tahun berjalan dengan rincian:

Beban Tenaga Kerja

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Beban Tenaga Kerja :		
a. Gaji dan upah		
- Gaji pokok pegawai	4.572.774	4.737.145
- Gaji tenaga kontrak	1.629.054	1.333.864
- Gaji ke 13 dan Bonus	2.711.863	-
- Tunjangan operasional	7.320.337	7.237.923
- Tunjangan jabatan	706.400	703.200
- Tunjangan suami / isteri	315.405	315.603
- Tunjangan anak	240.710	242.747
- Tunjangan pangan	782.350	791.636
- Tunjangan kemahalan	-	-
- Tunjangan hari raya (THR)	2.214.415	1.815.082
- Tunjangan kasir	59.000	61.800
- Tunjangan PPh. pasal 21	630.152	998.318
- Tunjangan Kehadiran	-	-
- Tunjangan Kontrak	-	-
- Tunjangan PPH Pasal 21	-	-
-Tunjangan kesejahteraan	1.832.239	1.937.270
b. Honorarium	-	-
- Dewan pengawas	313.750	313.750

Tabel. Rincian Gaji dan Honorarium

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
c. Lainnya		-
- Purna Bhakti DKPB		-
- Pesangon Pensiun	1.420.792	1.100.924
- Pakaian dinas	736.890	711.885
- Bonus / reward pegawai	146.200	-
- Jasa pengabdian pengurus		252.731
- Lainnya		-
	25.632.331	22.553.877
Biaya pendidikan	1.558.997	721.687
		-
		-
Total Beban Tenaga Kerja	27.191.328	23.275.564

Tabel. Total Beban Tenaga Kerja

Beban Sewa

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Beban Sewa :		
- Sewa gedung / kantor / kios	13769	27.402,00
- Sewa kendaraan	1087200	719.800
- Sewa perlengkapan kantor	44200	18.525
- Sewa lainnya	1050963	1.002.218
Sewa Perabot		
Lainnya		
Jumlah	2.196.132	1.767.945

Tabel. Rincian Sewa

Beban Asuransi

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Beban Premi Asuransi		
- DPLK		-
- Asuransi Purna Bhakti		-
- Asuransi Kesehatan	444.482	411.517
- Asuransi Asset	48.388	42.045
- Asuransi Cash In Safe	148.700	168.558
- BPJS Kesehatan	283.798	179.115
- BPJS Ketenagakerjaan	1.170.184	880.942
Jumlah	2.095.552	1.682.177

Tabel. Beban Premi Asuransi

Pajak dan Beban Pemeliharaan

	2016	2015
	(dalam ribuan)	(dalam ribuan)
Pajak - pajak		
Pajak Bumi dan Bangunan	4.785	4.554
Pajak Kendaraan	63.351	57.072
Pajak-pajak Lain	9.723	5.799
Jumlah	77.859	67.424
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan		
- Pemeliharaan gedung / kantor / kios	400.002	264.799
- Pemeliharaan perlengkapan & peralatan kantor	39.689	25.948
- Pemeliharaan mesin ketik	-	
- Pemeliharaan jaringan online	110.136	168.081
- Pemeliharaan komputer	143.067	160.670
- Pemeliharaan kendaraan & olie	353.248	298.545
- Pemeliharaan lainnya	407	100
Jumlah	1.046.549	918.143

Tabel. Pajak dan Beban Pemeliharaan

Beban Barang dan Jasa

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Beban Barang dan Jasa		
- Listrik / penerangan	540.516	527.596
- Air PDAM	37.377	27.167
- Telepon	159.206	142.307
- Voucher handphone	66.337	56.481
- Alat - alat tulis menulis :	-	-
a. Barang cetakan	306.828	350.038
b. Alat tulis	256.416	246.229
- Biaya perjalanan dinas	345.780	272.793
- Koran dan majalah	24.855	48.895
- Rekreasi	387.466	-
- Kunjungan dinas lain / jamuan rapat	-	-
- Olah raga	77.957	68.491
- Premium / solar	804.676	842.541
- Keamanan ambil dana	730.576	413.135
- Biaya rumah tangga kantor	579.071	590.150
- Katering	1.464.025	1.378.562
- Biaya audit bank	35.000	30.000
- Pengawasan OJK	271.822	215.759
- Transport SKAI	-	-
- Advokasi	-	-
- Lainnya	88.292	433.640
Jumlah	6.176.200	5.643.783
Beban Lainnya		
- Pemaparan RKAP		-
- Promosi		-
- Insentif pihak ketiga	462952	386.136
- Bingkisan / kenangan	6895	149.721
- Administrasi , pajak ABA	6539	7.195
- Biaya Notaris	28700	10.000
Jumlah	505.086	553.053
Total Beban Administrasi dan Umum	39.288.703	33.908.091

Tabel. Total Beban Administrasi dan Umum

7. Pendapatan dan (Beban) Non Operasional

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Pendapatan Non Operasional		
Keuntungan karena penjualan :		
- Aset Tetap dan Inventaris	129.544	37.855
- AYDA		-
Pemulihan Penurunan Nilai :		-
- Aset Tetap dan Inventaris		-
- AYDA		-
Pendapatan Ganti Rugi Asuransi		-
Bunga antar kantor		-
Selisih kurs		-
Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	144.133	225.981
Lainnya		-
- Beda kas	1.891	1.664
- Fee kerja sama		-
lainnya		-
- Kelebihan titipan pajak		-
- Selisih pembulatan		-
- Lainnya	220.365	63.129
Jumlah Pendapatan Non Operasional	495.934	328.630

Tabel. Pendaptan Non Operasional

	2016 (dalam ribuan)	2015 (dalam ribuan)
Beban Non Operasional		-
Kerugian karena penjualan/kehilangan		-
- Aset Tetap dan Inventaris		-
- AYDA		-
Kerugian Penurunan Nilai		-
- Aset Tetap dan Inventaris		-
- AYDA		-
Bunga antar kantor		4.561.735
Selisih kurs		-
Lainnya		-
- Denda / sangsi kewajiban pelanggaran	6.723	-
- Dana tanggung jawab sosial & lingkungan (CSR)	5.754	67.025
- Sumbangan / bantuan .	230.545	218.245
- Selisih aset tetap dan inventaris	-	-
- Lainnya	117.584	108.676
Jumlah Beban Non Operasional	360.606	4.955.681
		-
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	135.328	(65.317)

Tabel. Total Pendaptan Non Operasional

Rasio Rentabilitasi

ROA:

Laba selama 12 bulan terakhir/rata-rata total asset dalam 12 bulan terakhir
x 100% =

$$\text{Laba Rata-rata aset} = \frac{22.812.228}{582.286.206} \times 100\% = 3,92\%$$

Rasio ROA mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar -0,50% disebabkan oleh adanya kenaikan laba sebelum pajak dan aset.

BOPO:

Biaya operasional/pendapatan operasional x 100% =

$$\frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\% = \frac{76.209.965}{98.886.865} \times 100\% = 77,07\%$$

Rasio BOPO mengalami penurunan pada tahun 2016 dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 2,51% disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan operasional yang lebih tinggi daripada kenaikan beban operasional.

8. Laba Sebelum Taksiran Pajak Penghasilan Bank

Labanya sebelum taksiran pajak penghasilan Bank	22.812.228
Koreksi Positif :	
- Sumbangan	-
- Rekreasi	-
- Voucher handphone	8.292
- Premium / solar	28.800
- Koran dan majalah	6.214
- Bingkisan / kenangan	1.724
Jumlah Koreksi Positif	45.030
Koreksi Negatif	
- Pendapatan Bunga Giro	-
- Pendapatan Bunga Tabungan	-
- Pendapatan Bunga Deposito Berjangka	-
Jadi pendapatan bunga yang dikoreksi fiskal adalah .000 - (20% x .000)	
(Pendapatan Bunga telah dikenai pajak final pasal 4(2) sebesar 20%)	
Labanya setelah koreksi fiskal	22.857.258
Pembulatan labanya setelah koreksi fiskal	22.857.257
Perhitungan Pajak Terutang	
I. 25% x 22.857.257,00	5.714.314
Pajak Yang Telah Dibayar (PPh. Pasal 23)	(21.690)
Jumlah PPh Terutang Bersih	5.692.624
Angsuran Pajak (PPh Pasal 25) :	
- Januari	446.638
- Februari	446.638
- Maret	446.638
- April	481.403
- Mei	481.403
- Juni	481.403
- Juli	417.695
- Agustus	417.695
- September	417.695
- Oktober	460.780
- Nopember	460.780
- Desember	460.780
Jumlah angsuran PPh Ps. 25	5.419.548
Pajak Kurang Bayar PPh. Ps 29	273.076

Tabel. Labanya Sebelum Taksiran Pajak

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pengungkapan komitmen meliputi kontrak atau perjanjian yang memerlukan penggunaan dana dimasa yang akan datang seperti pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, periode berlakunya komitmen, nilai keseluruhan dan sanksi-sanksi. Pada periode desember 2016, dalam catatan bank tidak ada laporan komitmen, baik pada fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik maupun fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik.

Sedangkan pengungkapan kontijensi untuk perkara atau sengketa hukum meliputi pihak-pihak yang terkait, jumlah yang diperkarakan, latar belakang, isi dan status perkara, pendapat hukum serta probabilitas risiko dari peristiwa kontijensi diungkapkan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko. Dalam catatan bank terdapat nominal pada pos pendapatan bunga dalam penyelesaian sebesar Rp. 6.644.810,- ribu, pos aktiva produktif yang dihapus buku sebesar Rp. 13.364.973,-ribu, dan pos lain-lain yang bersifat administratif sebesar Rp. 1.180.543,- ribu. Sehingga total lapran kontijensi per desember 2016 sebesar Rp. 21.190.326,-ribu

SUBSEQUENT EVENT/KEJADIAN PENTING SETELAH AUDIT KAP

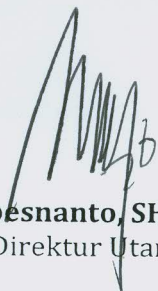
Tidak terdapat informasi, kejadian maupun fakta material yang terjadi dan memiliki dampak signifikan bagi kinerja dan risiko usaha Bank dimasa mendatang setelah tanggal laporan Akuntan Publik

TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca dan memeriksa dengan seksama serta menyetujui isi dari Laporan Tahunan yang didalamnya juga memuat Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016.

Purwodadi, 28 April 2016

Direksi PD. BPR BKK PURWODADI



H. Koesnanto, SH, M.Kn
Direktur Utama



Aristian Hari Marjoko, SE
Direktur Pemasaran



Harisanto, SE
Direktur Kepatuha

Lampiran-lampiran

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD.BPR BKK Purwodadi

Nama BPR : PD.BPR BKK Purwodadi

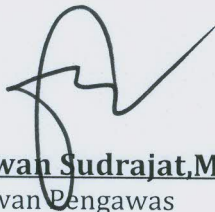
Posisi : 31 Desember 2016

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2,42	Baik
Analisis	
<p>Berdasarkan kertas kerja penilaian penerapan tata kelola, secara umum bank telah melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2016 dengan nilai komposit sebesar 2,42 dan peringkat komposit "Baik" sebagaimana uraian dibawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none">Tugas dan tanggungjawab Direksi. Baik tentang persyaratan jumlah, komposisi, kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan Direksi telah dipenuhi oleh Bank. Namun Bank belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai dengan ketentuan, hal tersebut dikarenakan kewajiban akan pelaporan penerapan tata kelola bagi BPR baru mulai diberlakukan tahun 2017.Tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas. Secara umum telah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam penilaian penerapan tata kelola. Namun dengan modal inti sebesar 78M per 31 Desember 2016, ketentuan tentang komposisi Dewan Pengawas belum dipenuhi oleh Bank. Hal ini disebabkan karena Bank masih dalam proses pengajuan anggota Dewan Pengawas baru menggantikan anggota Dewan Pengawas yang berakhir pada tanggal 05 Desember 2016. Sedangkan untuk anggota Dewan Pengawas Independen Bank masih dalam Proses permohonan	

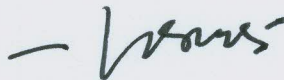
persetujuan kepada pemilik saham.

3. **Penanganan Benturan Kepentingan.** Selain Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan, Bank senantiasa memonitoring pencegahan adanya benturan kepentingan. Sehingga sampai dengan posisi Desember 2016 belum pernah terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh seluruh organ organisasi Bank, termasuk tidak ada pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank
4. **Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Managemen Risiko.** Bank telah memiliki Satuan Kerja Managemen Risiko termasuk didalamnya menjalankan fungsi kepatuhan. Dibawah wewenang Direksi Umum yang independen terhadap fungsi operasional, Satuan Kerja Managemen Risiko Bank telah melaksanakan tugasnya sebagaimana ketentuan dari OJK salah satunya telah membuat laporan rencana tindak.
5. **Penerapan Fungsi Audit Internal dan Eksternal.** Hampir sepenuhnya bank telah melakukan penerapan fungsi audit internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Batas maksimum pemberian kredit.** Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPK termasuk didalamnya laporan telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
7. **Rencana Bisnis, Transparansi Kondisi keuangan dan non keuangan** telah disusun dan dilaporkan secara berkala dan tepat waktu pada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Purwodadi, 31 Januari 2017
PD.BPR BKK Purwodadi,



Dr. Ir. Ihwan Sudrajat, MM
Ketua Dewan Pengawas



Harisanto, SE
Direktur Umum



Purwodadi, 13 Maret 2017

Nomor : 581/20/K.04/ KANPUS / III/ 2017
Lampiran : -

Kepada:

Kantor Akuntan Publik

Sodikin & Harijanto

Jl. Pamularsih Raya No. 16

Semarang

Perihal : **Surat Representasi Manajemen**

Kami memberikan Surat Representasi ini sehubungan dengan audit Saudara atas Neraca **PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan** tanggal 31 Desember 2016, Laporan laba (rugi), Laporan perubahan ekuitas, dan Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 yang ditujukan untuk menyatakan pendapat apakah Laporan Keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas **PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan** sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyajian wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP.

Representasi tertentu dalam surat ini dijelaskan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya. Jika sesuatu tersebut menyangkut penghilangan atau salah saji informasi akuntansi dengan mempertimbangkan keadaan yang melingkupinya, menjadikan pertimbangan orang yang berpikiran wajar yang meletakkan kepercayaan pada informasi tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh penghilangan atau salah saji tersebut.

Kami menegaskan, berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami, representasi berikut ini telah kami buat kepada Saudara selama audit Saudara:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
2. Kami telah menyediakan kepada Saudara semua:
 - a. Catatan akuntansi dan data lain yang berkaitan.
 - b. Notulen rapat pemegang saham, dan Dewan Pengawas, atau ringkasan dari keputusan yang belum dibuat notulennya.
3. Tidak terdapat komunikasi dari badan pengatur mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan dalam praktik pelaporan keuangan.
4. Tidak terdapat transaksi material yang tidak secara semestinya dicatat dalam catatan akuntansi yang melandasi laporan keuangan.
5. Tidak ada:
 - a. Kecurangan yang melibatkan manajemen atau karyawan yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
 - b. Kecurangan yang melibatkan karyawan lain yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan.
6. **PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan** tidak memiliki rencana atau maksud yang dapat berdampak material terhadap nilai berjalan atau klasifikasi aset dan utang.
7. Hal-hal berikut telah dicatat atau diungkapkan dalam Laporan Keuangan secara memadai:
 - a. Transaksi antarpihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk penjualan, pembelian, penyajian sewa guna usaha, jaminan, dan jumlah piutang kepada atau utang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
 - b. Jaminan, lisan atau tertulis, yang dapat menjadikan **PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan** memiliki kewajiban bersyarat.
 - c. Estimasi signifikan dan pemusatan material yang diketahui oleh manajemen yang harus diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Tidak terdapat:
 - a. Kemungkinan unsur tindakan pelanggaran atau unsur tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang berdampak yang harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar untuk mencatat rugi bersyarat.
 - b. Utang lain yang material atau laba atau rugi bersyarat yang diharuskan untuk dicatat atau diungkapkan sesuai dengan SAK ETAP.
9. **PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan** memiliki hak penuh terhadap aset yang dimilikinya, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset atau aset yang digadaikan.
10. **PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan** telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika kami tidak mematuhi perjanjian tersebut.
11. Penunjukan hanya satu auditor untuk tahun buku yang bersangkutan
12. **PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan** tidak sedang dalam kondisi dipailitkan.
13. Tidak terdapat peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang memerlukan penyesuaian terhadap atau pengungkapan dalam laporan keuangan.

PD. BPR BKK Purwodadi Kabupaten Grobogan



H. Koesnanto, SH., M.Kn.

Direktur Utama